

# Hasil Plagiasi Buku Membedah Investasi

*by*

---

**Submission date:** 21-Mar-2019 03:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1097130212

**File name:** DidinF\_Buku\_MEMBEDAH\_INVESTASI.pdf (904.67K)

**Word count:** 17741

**Character count:** 121816

**Dr.Didin Fatihudin,SE.,M.Si**

# Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi

Membedah Investasi, Menuai Geliat Ekonomi

Penulis: Dr.Didin Fatihudin,SE.,M.Si

Editor: xxxxxxxx

Layout: xxxxxxxxxxxxxx

Desain cover: xxxxxxxxxxxxxx

Penerbit: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

## Prakata

Buku ini mengkaji teori investasi dari dimensi ilmu ekonomi. Investasi (penanaman modal) merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu Negara (daerah). Besar kecilnya investasi yang direalisasikan dalam suatu negara dapat berpengaruh pada besar kecilnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. <sup>13</sup> investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal (Dornbusch,1986:236). Barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Dalam neraca pendapatan nasional pengeluaran investasi terdiri dari pengeluaran untuk pabrik, peralatan baru, investasi persediaan, dan pembangunan rumah tinggal. <sup>1</sup> Meir dalam *Kajian Ekonomi Regional* (2007:6) pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi investasi <sup>1</sup> paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam realitas, investor akan selalu memperhatikan beberapa hal seperti <sup>3</sup> keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan <sup>1</sup> dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi multidimensi <sup>10</sup> menjadi pertimbangan bagi para investor. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang/jasa dalam perekonomian serta menghasilkan lebih banyak barang/jasa di masa akan datang. <sup>3</sup> Sukirno,(2000:106) faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, ekspektasi kegiatan ekonomi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Disamping suberdaya manusia, akumulasi modal dan kemampuan manajerial skill.

Surabaya, Juni 2012

## Daftar Isi

Teori Pembangunan Ekonomi  
Teori Pertumbuhan Ekonomi  
Teori Investasi  
Jenis-jenis Investasi  
Kriteria dan Dasar Pertimbangan Investasi  
Investasi Pemerintah  
Belanja/Pengeluaran Pemerintah  
Teori Tenaga Kerja dan Kebijakan Pengupahan  
Kesempatan Kerja dan Penyerapan Angkatan Kerja  
Teori Kesejahteraan Masyarakat  
Pembangunan Ekonomi Daerah  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Klasifikasi Indikator Ekonomi Daerah  
Daftar Pustaka  
Tentang Penulis

## Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menurut Kuznets dan H.B. Chenery dalam Mahyudi (2004:1) adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan terutama terjadinya perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memerhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.

Sukirno (2006:3) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi secara umum diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Baldwin dan Meier dalam Abipraja (1993:1) berpendapat *economic development is a process where by an economy's real national income over a long period of time.* Pembangunan ekonomi adalah suatu proses ketika pendapatan nasional riil suatu perekonomian meningkat selama kurun waktu panjang, jika tingkat pembangunan itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan bertambah.

Abipraja (1993:1) menjelaskan pembangunan ekonomi adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan

kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk masyarakat, meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga unsur penting yaitu (a) suatu proses (perubahan yang terjadi terus menerus), (b) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, (c) kenaikan pendapatan per kapita terus berlangsung dalam jangka panjang.

Teori Pembangunan ekonomi Adam Smith membagi masa atau tahapan dalam lima tahap (Mahyudi, 2004:165) yaitu tahap berburu, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap berdagang, dan tahap industrialisasi. Tahap pembangunan Adam Smith lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilik modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan.

Smith dalam Deliarnov (2005:37) menganggap penting akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Cara terbaik melakukan investasi, yaitu membeli mesinmesin dan peralatan. Adanya mesin modern/canggih, produktivitas tenaga kerja akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan peningkatan produksi perusahaan. Jika perusahaan melakukan hal sama, output nasional, juga berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Para pekerja yang dianggap tidak mampu mengakumulasi modal dan tidak memiliki tabungan karena hanya berasal dari upah para pekerja habis untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Lebih jelas dalam Abipraja (1993:46) menurut Adam Smith, terjadinya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja (*division of labor*), karena dengan adanya spesialisasi produktivitas tenaga kerja menjadi meningkat sehingga dapat menambah kemahiran tenaga kerja, lebih efisien waktu produksi, dan adanya penemuan

alat/mesin produksi lebih baik. Ini biasa terjadi jika ada akumulasi modal terlebih dahulu yang berasal dari tabungan dan pasar yang semakin meluas.

Teori pembangunan ekonomi Karl Max membagi masa perubahan masyarakat secara perlahan-lahan (evolusi) menjadi tiga macam (Mahyudi,2004:165), yaitu masa feodalis, masa kapitalis, dan masa sosialis. Teori pembangunan ekonomi Karl Max <sup>5</sup> mendasarkan adanya pertentangan kelas antara kapitalis (pemilik modal) dengan para proletar (pekerja) dalam masa kapitalis Karl Max, terjadi eksploitasi (penghisapan) oleh para kapitalis terhadap para proletar yang berupa selisih antara tingkat produktivitas para pekerja (*marginal physical product of labor*) terhadap upah yang diperoleh. Selisih ini menurut Karl Max pada puncaknya, karena adanya eksploitasi kapitalis terhadap para pekerja (proletar) sudah tak tertahan akan terjadi pemberontakan para pekerja (revolusi) untuk mengubah masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis.

Teori Pembangunan JM Keynes berbeda dengan Adam Smith (Mahyudi, 2004:166) yang hanya menganggap pembangunan ekonomi dapat dilakukan oleh kelompok kapitalis (pengusaha/wiraswasta) saja dan juga tidak terlalu ekstrem, seperti teori pembangunan Karl Max yang hanya mementingkan para pekerja. Teori pembangunan campuran JM Keynes yang berusaha menggabungkan kedua paham teori pembangunan antara kapitalisme dan sosialisme, mengajukan peranan pemerintah untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara, misalnya di Indonesia melalui APBN, aturan-aturan atau regulasi yang cenderung membela masyarakat atau pengusaha kecil, mekanisme pasar modal dan lain-lain.

Schumpeter dalam Abipraja (1993:54) memiliki keyakinan <sup>26</sup> bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Dalam pembangunan yang memegang peranan penting adalah golongan pengusaha

(*entrepreneur*) inovatif, yaitu golongan masyarakat yang dapat mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang keperluan masyarakat. Pengusaha menciptakan pembaruan inovasi dalam perekonomian.

Teori pembangunan ekonomi Arthur Lewis membagi perekonomian menjadi dua macam yaitu perekonomian industri dan perekonomian tradisional. Dalam perekonomian tradisional terjadi kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan. Kelebihan tenaga kerja di pedesaan disebabkan oleh tingkat produksi yang masih terbatas tanpa adanya penambahan modal dan penggunaan teknologi dan fungsi produksi mengalami *law of diminishing return*, hukum hasil yang semakin berkurang dari David Ricardo (1772-1823) di mana upah tenaga kerja hanya sebesar rata-rata produktivitas para pekerja, karena banyaknya pengangguran tersembunyi.

Dalam perekonomian industri terjadi kekurangan tenaga kerja di daerah perkotaan. Kekurangan tenaga kerja terjadi disebabkan tambahan modal sebagai akumulasi laba yang ditanamkan kembali atau diinvestasikan kembali ke sektor industri. Berikutnya sebagian hasil akumulasi, laba juga dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang mampu meningkatkan produksi dan kapasitas produksi.

Perekonomian industri di perkotaan menurut Lewis mampu memberikan upah 30 persen di atas upah pekerja di sektor pertanian/perekonomian tradisional. Tingginya upah di sektor industri perkotaan mampu menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pekerja perkotaan.

Kritik terhadap Teori Lewis, pada kenyataannya, pertama, keuntungan/laba yang ditanamkan kembali ke sektor industri oleh pengusaha untuk menambah kapasitas mesin dan perkembangan teknologi serta mengganti faktor produksi tenaga kerja manusia. Kedua, pada

negara-negara berkembang saat ini, justru terjadi kelebihan tenaga kerja di daerah perkotaan, sedang di pedesaan terjadi kekurangan tenaga kerja. Ketiga, upah-upah di negara berkembang bukannya tetap, tetapi terus meningkat, termasuk juga upahupah di daerah pedesaan. Keempat, dengan majunya teknologi agroindustri (pertanian dan peternakan), hasil agroindustri tidak tergantung pada musim, tetapi sesuai permintaan pasar, atau penawaran hasil agroindustri bersifat elastis terhadap harga yang pada gilirannya mampu menyamakan tingkat upah pedesaan dengan upah perkotaan.

Teori Dependensia dari Paul Baran dan Andre Gunderfrank (Mahyudi,2004:168) yang menciptakan dasar tesis alternatif mengenai negara-negara berkembang dan menjelaskan penyebab keterbelakangan negara tersebut. Teori ini membagi perekonomian menjadi dua, yaitu negara-negara maju yang disebut metropolis dan negara-negara sedang berkembang disebut negara satelit terbelakang. Interaksi negara maju dengan negara miskin bersifat eksploitasi negara maju terhadap negara miskin yang menyebabkan negara miskin tergantung negara maju.

Investasi negara maju di negara miskin memang dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat saja (konglomerat/ borjuis/komparador). Sistem sosial masyarakat berubah dari paternalistik menjadi kapitalistik didasarkan rasionalitas pasar. Sistem sosial ini memperhebat proses eksploitasi pemilik modal dengan sistem kapitalis yang kadang diiringi oleh proses korupsi dan ketidakadilan. dalam struktur pemerintahan yang mengutamakan pemilik modal.

Theotonio Dos Santos dalam Mahyudi (2004:169) mengklasifikasikan ketergantungan disebabkan tiga faktor internal yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan, dan ketergantungan teknologi industri. Kemandirian negara berkembang sangat

diharapkan. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi harus terus ditingkatkan agar ketergantungan pada negara maju dapat dikurangi.

Dinyatakan Sukirno (2006:10) bahwa cara mudah untuk membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dengan ungkapan <sup>14</sup> bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (*economics growth*) ditambah perubahan (*change*). Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan infrastruktur tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

<sup>2</sup> Oleh karena itu pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai di mana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah diukur hanya secara kuantitatif. Berbagai data perlu dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (1999:124-130) <sup>16</sup> ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa yaitu (1) akumulasi modal, (2) pertumbuhan penduduk, dan (3) kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya.

<sup>2</sup> Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan kemudian hari. Pertumbuhan penduduk <sup>2</sup> (angkatan kerja) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah produktivitas. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya juga akan semakin besar, namun positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan jumlah angkatan kerja.

Kebanyakan ekonomi, terutama kalangan teknokrat, mengasumsikan <sup>16</sup> kemajuan teknologi (*technological progress*) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi paling penting. Pengertian paling sederhana bahwa kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara-cara lama dengan menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kehidupan perekonomian merupakan aktivitas sangat kompleks, penuh berbagai transaksi barang dan jasa antarelemen masyarakat. Perekonomian selalu berkaitan dengan entitas individual seperti pasar, perusahaan, dan rumah tangga. Untuk mengetahui bagaimana perekonomian itu terjadi, perlu memahami ilmu ekonomi.

Menurut Samuelson (2004:4), ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya langka untuk memproduksi komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas.

Menurut Budiono (1990:1)<sup>38</sup> secara umum ilmu ekonomi berguna karena ilmu ekonomi dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu masalah ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sen dalam Pressman (2000:274-275) pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang dan jasa terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Perkembangan ekonomi meliputi pengembangan kemampuan manusia. Pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan per kapita, sementara perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Menurut Harrod-Domar dalam Tambunan (2001:46), pengeluaran pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi terutama peranan investasi memiliki dampak positif melalui proses pengganda (*multiplier effect*) terhadap permintaan agregat dan juga pada penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, investasi yang dilakukan akan menambah stok kapital. Setiap penambahan stok kapital masyarakat akan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan output. Keadaan ini berarti adanya peningkatan pertumbuhan.

Samuelson (2004:5) berpendapat bahwa suatu perekonomian berproduksi secara efisien, bila tidak membuat siapa pun secara ekonomi menjadi lebih baik tanpa membuat yang lain lebih buruk keadaannya. Teori pertumbuhan dari Adam Smith yang mengkaji

pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis (Budiono,1999:8) menyatakan ada <sup>9</sup> dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan output menyatakan bahwa sistem produksi suatu Negara terdiri dari tiga unsur pokok: sumber daya alam, sumber daya manusia (jumlah penduduk), dan stok barang kapital yang ada. Sumberdaya alam terbatas tetapi yang menentukan besar kecilnya output produksi dari tahun ke tahun adalah peran sumber daya manusia dan stok kapital. Penduduk walaupun terbatas pada jumlah tertentu adalah tenaga kerja potensial peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, begitu pula dengan akumulasi kapital.

Makin besar stok kapital, menurut Smith, makin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja (*specialization and division of labor*), dan selanjutnya semakin tinggi produktivitasnya per pekerja.

Budiono (1999:2) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Suatu proses yang dinamis, bagaimana suatu perekonomian <sup>5</sup> berkembang atau berubah dari waktu ke waktu dari output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Teori pertumbuhan harus mampu menjelaskan bagaimana pertumbuhan output di satu sisi dan bagaimana pertumbuhan jumlah penduduknya sisi lain. Kontribusi sumberdaya manusia melalui *managerial skill* dan modal dioptimalkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

<sup>1</sup> Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dua faktor (Jhingan, 2007:67-77) yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung sumberdaya alam, manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya (ekonomi). Tetapi diingat bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi jika tidak ditunjang oleh

perubahan-perubahan lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral dan sikap budaya dalam suatu bangsa (non-ekonomi).

Keterbatasan sumber daya alam dan kekhawatiran dari kelebihan jumlah penduduk dari teori klasik, menurut Schumpeter dalam Budiono (1999:47) merasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan terus sesuai dengan kemajuan teknologi. Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang disebut <sup>26</sup> inovasi, dan pelakunya adalah para wiraswasta, inovator atau entrepreneur. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterangkan dengan adanya inovasi dari para entrepreneur. Inovasi teknologi mampu meningkatkan kapasitas produksi secara lebih efisien. Menurut Sukirno (2007:9), <sup>1</sup> pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tahun tertentu akan selalu digunakan formula berikut.

$$\Delta G_t = \frac{GDP_t - GDP_{(t-1)}}{GDP_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta G_t$  adalah laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*).

t adalah tahun tertentu.

$GDP_t$  (*gross domestic product/PDB*) <sup>24</sup> adalah pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam tahun tertentu (t).  $GDP_{(t-1)}$  adalah pendapatan nasional riil tahun tertentu dikurangi

GDP tahun sebelumnya (tahun t-1).

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Pada umumnya para ahli termasuk Kuznet dalam kajian pertumbuhan ekonomi modern akan selalu mengacu kepada perkembangan negara-negara maju, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jepang. Memang negara maju telah menjadi acuan bagi negara-negara sedang berkembang.

<sup>6</sup> Kuznets dalam Jhingan (2007:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Masih dalam Jhingan (2007:58-65), Kuznets menyebutkan ada <sup>1</sup> enam ciri dalam pertumbuhan ekonomi modern. Pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Kedua, peningkatan produktivitas. Ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Keempat, urbanisasi. Kelima, ekspansi negara maju. Keenam, arus barang, modal, dan orang antarbangsa.

Dari keenam ciri pertumbuhan ekonomi itu dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, secara kuantitatif berkaitan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk. Kedua, berkaitan dengan peralihan struktural. Ketiga, berkaitan dengan dunia internasional.

Dalam Pass, Christopher & Bryan Lowes (1977:611) mengatakan bahwa model pertumbuhan ekonomi Solow (*Solow economic-growth model*) suatu teori yang disusun dengan fokus pada peranan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, rasio-rasio output-modal diasumsikan konstan sehingga terdapat suatu hubungan garis lurus antara peningkatan jumlah modal (*capital stock*) melalui investasi (*investment*).

Lebih jelas Harrod-Domar dalam Jhingan (2007:229) memberikan <sup>14</sup> peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, bahwa investasi dapat menciptakan pendapatan (dampak permintaan). Kedua, dengan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dalam perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (dampak penawaran). Karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, <sup>18</sup> pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, <sup>18</sup> baik pendapatan nyata maupun output, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produksi modal meningkat.

Jhingan (2007:67) menyatakan bahwa <sup>9</sup> proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dua macam faktor: faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non-ekonomi yang berpengaruh pada proses pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Walaupun bukan satu-satunya ukuran tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita, juga harus ada peningkatan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan struktur kelembagaan lainnya seperti pengaturan kependudukan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.

Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan selalu berkaitan dengan

masalah laju pertumbuhan kapasitas produksi, laju pertumbuhan penduduk daerah, struktur kehidupan masyarakat daerah akan berubah dan juga tidak bisa lepas dari pengaruh perdagangan dari luar daerah bahkan internasional.

Kabupaten/kota yang tingkat ekonominya makmur salah satu indikatornya adalah jika laju kapasitas produksi melebihi laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya jika laju pertumbuhan kapasitas produksi lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk, maka daerah tersebut dapat hampir dipastikan termasuk kabupaten/kota yang tingkat ekonominya rendah. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan selalu menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan indikator ekonomi sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan.

## 2 Teori Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara/daerah. Besar kecilnya investasi yang direalisasikan dalam suatu negara dapat berpengaruh pada besar kecilnya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Dornbusch (1986:236), investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Barang modal (*capital stock*) itu terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Dalam neraca pendapatan nasional, pengeluaran investasi terdiri dari pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru, investasi persediaan, dan pembangunan rumah tinggal.

Menurut Meier dalam Kajian Ekonomi Regional (2007:6), pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Akan tetapi dalam dunia nyata, investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha akan selalu memerhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan dukungan pemerintah. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasinya.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang/jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang/jasa di masa akan

datang. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, ekspektasi mengenai kegiatan ekonomi di masa depan, dan kemajuan teknologi (Sukirno, 2000:106).

Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak bagi penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak atau tidak. Hal tersebut terkait pula dengan tata ruang, gangguan lingkungan, dan ketertiban umum di daerah. Iklim investasi merupakan suatu proses jangka panjang yang senantiasa berjalan searah dengan perkembangan usaha. Iklim investasi yang baik akan searah dengan keberhasilan investasi sepanjang perusahaan itu beroperasi.

Investasi (*investment*) dalam teori ekonomi diartikan sebagai penanaman modal, penambahan barang-barang modal baru (*new capital formation*). Menurut Robinson dalam Rosyidi (2004:165) pengeluaran investasi menurut penggunaannya dibagi menjadi tiga kepentingan yaitu konstruksi (*construction*), perbaikan (*rehabilitation*), dan perluasan (*expansion*). Konstruksi adalah pengeluaran untuk membangun sesuatu hal yang memang baru sementara rehabilitasi merupakan pengeluaran untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak (menyusut). Sedangkan ekspansi yaitu pengeluaran untuk memperbesar kapasitas, mempertinggi volume atau memperlebar ruang gerak.

Menurut Sukirno (2000:366), investasi dalam teori ekonomi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu perekonomian. Pengeluaran untuk mendirikan pabrik, membeli mesin-mesin produksi, penyediaan bahan mentah atau memperluas perkebunan sehingga mendatangkan keuntungan di masa datang.

Ada beberapa jenis investasi yaitu *autonomous investment dan induced investment*. Kedua, *public investment dan private investment*. Ketiga, *domestic investment dan foreign*

*investment*. Keempat, *gross investment dan net investment* (Rosyidi, 2004:169-172).

Investasi otonom (*outonomous investment*) adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi pendapatan, tidak dapat berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor-faktor lain pendapatan yang memengaruhi tingkat investasi seperti itu misalnya tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, harapan pengusaha, dan sebagainya. Teknologi dapat mengubah investasi, misalnya kemajuan teknologi perang menyebabkan banyak negara menanamkan modalnya di bidang militer. Kebijakan pemerintah dalam penerapan aliran listrik untuk daerah terpencil, walaupun GNP tidak mengalami perubahan, investasi tersebut tetap dilakukan.

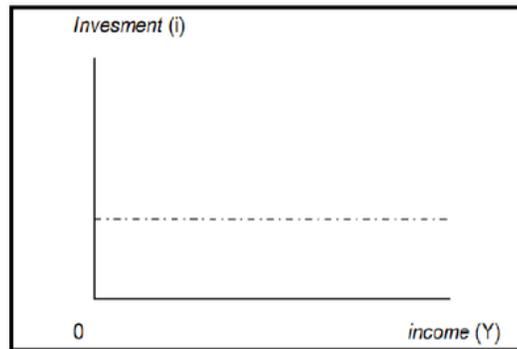
Investasi terimbas (*induced investment*) kebalikannya investasi ini sangat dipengaruhi tingkat pendapatan. Secara fungsional dinyatakan bahwa tingkat investasi dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan positif. Investasi total yang dilakukan dalam suatu perekonomian adalah komposit dari investasi otonom ditambah investasi terimbas yang merupakan dari fungsi pendapatan.

*Public investment* adalah investasi atau penanaman modal dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, investasinya diarahkan untuk melayani atau menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. *Private investment* merupakan investasi yang dilaksanakan swasta, motif keuntungan di masa depan sangat berperan dalam menentukan volume investasi. *Domestic investment* ialah penanaman modal dalam negeri di dalam negeri.

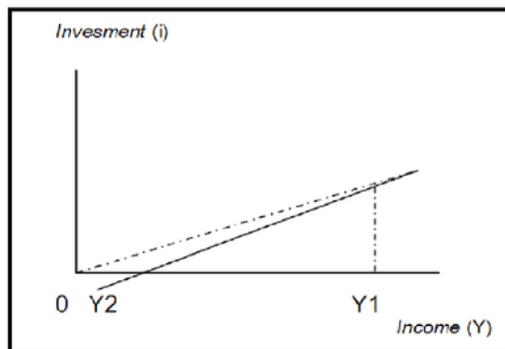
*Foreign investment* adalah penanaman modal asing. Negara yang banyak memiliki banyak faktor produksi alam (*natural resources*) dan atau manusia (*human resources*), tetapi tidak memiliki banyak modal (*capital*), akan mengundang pemodal asing agar sumber daya tersebut dapat dioptimalkan. *Gross investment* adalah penjumlahan dari investasi otonom dan

investasi terimbas. Seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara.

*Net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Misalnya investasi bruto tahun ini 25 juta rupiah sedangkan penyusutannya selama setahun sebesar 10 juta rupiah, maka investasi netto tahun ini sebesar 15 juta rupiah. *Outonomous Investment* dan *induced investment* dapat dilihat pada Gambar 2.1. dan Gambar 2.2.



**Gambar 2.1.** *Outonomous investment*. Besar kecilnya investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.



**Gambar 2.2.** *Induced investment*. Investasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.  
Sumber: Rosyidi (2004:170).

Yuliati, *et al.* (1996:2) menyatakan bahwa investasi sering diartikan sebagai aktivitas pembelian obyek produktif yang ditujukan untuk memperbesar kekayaan investasi. Secara intuitif masyarakat akan menginvestasikan kekayaannya dengan harapan akan memperoleh

kontraprestasi lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkannya.

Sukirno (2000:366) menyatakan investasi dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai <sup>3</sup> pengeluaran-pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa mendatang. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah suku bunga, prediksi tingkat keuntungan, prediksi mengenai kondisi ekonomi ke depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan Fisher, Jordan dalam Ahmad (1996:3) mendefinisikan investasi sebagai *"a commitment of funds made in the expectation of some positive rate of return."* Hampir sama dengan yang didefinisikan Francis, dalam *investment analysis and management*, *"An investment is commitment of money that is expected to generate of additional money."* Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang (dana) tersebut.

Analisis investasi dan manajemen portofolio seharusnya dipahami mendalam dan sistematis oleh investor sebelum melakukan investasi. Misalnya bagaimana investor dalam menetapkan tujuan investasi, mengukur dan memperkirakan kinerja kesempatan investasi, prospek pasar ke depan sehingga bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Begitu pula tidak kalah pentingnya investor harus memahami bagaimana caranya meminimumkan risiko investasi.

## Jenis-Jenis Investasi

Secara umum investasi itu dikategorikan menjadi dua jenis (Ahmad,1996:2): investasi <sup>3</sup> real assets dan financial assets. Aset riil (*real*) bersifat wujud seperti gedung-gedung, kendaraan, pabrik, rumah, apartemen dan sebagainya. Aset keuangan (*finance*) merupakan dokumen atau surat-surat berharga berupa saham, obligasi, danareksa, dana pensiun atau lainnya. Perbedaannya jika aset keuangan jauh lebih mudah untuk diubah menjadi uang, sedangkan aset riil memerlukan waktu agak panjang. Untuk kepentingan jangka pendek investor, likuiditas aset finansial jauh lebih baik dibanding aset riil.

Ada beberapa alasan masyarakat melakukan investasi (Ahmad,1996:4) antara lain, pertama, <sup>3</sup> untuk mendapatkan kehidupan lebih layak di masa akan datang. Masyarakat yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa akan datang.

Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilihan obyek atau perusahaan lain, masyarakat dapat menghindarkan diri agar kekayaan (aset) yang menjadi miliknya tidak merosot nilainya. Ketiga, <sup>3</sup> Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat untuk melakukan investasi pada bidangbidang usaha tertentu.

Dalam makroekonomi dinyatakan Lipsey *et al.* (1995:41) bahwa pengeluaran investasi adalah pengeluaran pada produksi barang tidak untuk konsumsi sekarang, termasuk sediaan,

barang modal seperti pabrik, mesin dan gudang, dan perumahan tempat tinggal. Barang-barang semacam ini disebut barang investasi.

Menurut Lipsey *et al.* (1995:42), investasi itu terdiri dari dua macam yaitu investasi bruto dan investasi neto. Investasi bruto adalah investasi total yang terjadi didalam sistem ekonomi. Investasi ini dibagi menjadi dua bagian ; investasi penggantian dan investasi neto.

Investasi penggantian adalah jumlah investasi yang sekadar mempertahankan sediaan modal yang ada, yang disebut dengan cadangan konsumsi modal atau mudahnya disebut penyusutan. Investasi bruto dikurangi dengan investasi penggantian sama dengan investasi neto. Investasi neto yang positif akan menaikkan sediaan modal total sistem ekonomi, sedangkan investasi penggantian mempertahankan sediaan modal yang ada dengan menggantikan apa yang sudah habis digunakan.

Semua investasi bruto dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Hal ini disebabkan karena semua investasi barang merupakan bagian dari keluaran total nasional dan produksinya menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja apakah barang yang diproduksi itu merupakan bagian dari investasi neto atukah hanya merupakan investasi penggantian.

## **Kriteria dan Dasar Pertimbangan Investasi**

Ada beberapa landasan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk investasi. Menurut Mangkoesoebroto (1998:82), pertimbangan utama dalam memilih suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku, tingkat pengembalian (*rate of return*) dari barang modal, dan prospek harapan berkembang proyek investasi.

Pembelian barang modal tidak selamanya berarti investasi. Investasi adalah penambahan barang modal secara neto positif. Kriteria pengambilan keputusan untuk pembelian barang modal adalah dengan melihat tingkat pengembalian (*rate of return*) dari barang modal tersebut. Apabila tingkat pengembalian suatu barang modal A lebih besar dari pada tingkat pengembalian dari barang modal B jenis lain, maka barang modal pertama A yang dibeli.

Dinyatakan Arsyad (1999:258) bahwa pemahaman tentang penilaian suatu proyek pembangunan menuntut pemahaman juga pada kriteria investasi. Kriteria investasi ini menyangkut prinsip-prinsip yang mendasari proses pengalokasian investasi dengan cara rasional agar pendapatan nasional dan daerah dapat dimaksimumkan. Pengambilan keputusan investasi mempunyai 2 (dua) orientasi, yaitu sisi pemerintah (*public sector*) dan sisi swasta (*private sector*).

Kriteria investasi swasta didasari orientasi maksimasi laba sementara kriteria investasi pemerintah orientasi utamanya adalah maksimalisasi kesejahteraan masyarakat (publik). Namun demikian, ada juga kesamaan prinsip antara keduanya, yaitu bagaimana memilih

proyek yang memberikan manfaat (benefit) terbesar dengan biaya yang tertentu diantara berbagai rencana proyek yang ada.

Seperti diungkapkan di atas pada umumnya perusahaan swasta memproduksi semata-mata didorong oleh maksimasi laba. Seringkali pilihan investasi swasta ditanamkan pada proyek-proyek yang kurang menunjang pembangunan ekonomi makro secara langsung. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan alokasi investasi tersebut dan memengaruhi arah investasi swasta ke arah proyek yang berorientasikan pada pembangunan ekonomi makro nasional dan daerah secara langsung. Untuk ini, pilihan yang tersedia bagi pemerintah adalah antara teknologi padat modal dan teknologi padat karya.

Pada dasarnya kriteria investasi merupakan alat analisis untuk menentukan apakah suatu proyek layak (*feasible*) untuk dilaksanakan atau harus ditunda. Proyek dapat dilaksanakan jika dalam analisis investasi diketahui manfaat bersih (*benefit netto*) lebih besar dari manfaat bersih marginal (*marginal benefit netto*) dari proyek tersebut, demikian pula jika sebaliknya.

Dalam kaitan ini Arsyad (1999:258-283) menyatakan para ekonom dan ahli keuangan telah mengemukakan sejumlah kriteria investasi seperti, pertama, kaidah nilai sekarang bersih (*Net Present Value/NPV*); kedua, kaidah *Internal Rate of Return* (IRR); ketiga, *capital rationing*; keempat, kriteria perputaran modal juga sering disebut kriteria maksimalisasi output per unit modal atau kriteria rasio output terhadap modal, menurut Chenery kriteria ini bermanfaat untuk memilih antara berbagai proyek dalam sektor tertentu; kelima, kriteria produktivitas marginal sosial dari Kahn dan Chenery; keenam, kriteria reinvestasi dari Galenson dan Leibenstein (1955) yang sempat dikritik Amartya Sen (1967); ketujuh, kriteria deret waktu (*Time Series*).

Berbagai kriteria investasi yang dikemukakan di atas tidak ada yang berbeda dalam tujuan akhirnya, yaitu memaksimalkan output nasional. Hanya cara pendekatannya yang berbeda. Untuk memaksimalkan output total para ahli ekonomi menggunakan berbagai komponen pendapatan nasional: konsumsi, tabungan, dan investasi. Ada yang memberi tekanan lebih banyak pada salah satu komponen. Beberapa kriteria investasi bertujuan memaksimalkan output total satu titik waktu, sedang yang lain mencakup periode waktu.

Masih menurut Arsyad (1999:287) semua kriteria itu tidaklah lengkap karena semua kriteria tersebut telah mengabaikan pengaruh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, selera, kemajuan teknis, kondisi pasar, distribusi pendapatan, perubahan harga, keadaan neraca pembayaran, dan kondisi sosial budaya pada tingkat investasi. Sebaliknya kriteria-kriteria tersebut di atas juga tidak membahas dampak investasi pada faktor-faktor ini. Bahkan penggunaan teknik input-output dan konsep harga dan biaya bayanganpun tidak berhasil memecahkan masalah ini secara memuaskan. Namun di samping keterbatasan teoritis dan praktis yang nampak ini, berbagai kriteria investasi tersebut semakin banyak digunakan di dalam menyusun program alokasi sumberdaya di hampir semua negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia. Tetapi yang penting adalah bahwa kriteria-kriteria tersebut harus sesuai tujuan sosial dan ekonomi negara bersangkutan.

Landasan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dapat digunakan dua pendekatan, pertama, pendekatan nilai sekarang (*Net Present Value*) dan kedua pendekatan tingkat pengembalian modal (Sukirno, 2007:370-373). Nilai sekarang dapat diartikan sebagai nilai sejumlah uang tertentu di masa depan yang dinyatakan sebagai nilai di masa kini. Sedangkan tingkat pengembalian modal dinyatakan dalam persen, dan ia menggambarkan tingkat keuntungan per tahun dari modal yang diinvestasikan. Persamaan nilai sekarang dan

persamaan tingkat pengembalian modal sebagai berikut.

Persamaan Nilai Sekarang (*Net Present Value*)

$$PV = \frac{Y_1}{(1+r)^1} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \frac{Y_n}{(1+r)^n}$$

Keterangan:

PV adalah nilai sekarang pendapatan yang diperoleh di antara tahun 1 hingga tahun n, apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasi pada tahun n.

Y1, Y2 .. Yn adalah pendapatan neto (keuntungan) yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun n. r adalah tingkat bunga. (Sukirno,2007:370-373)

Jika nilai sekarang modal yang diinvestasikan adalah M, penanaman modal tersebut dikatakan menguntungkan apabila nilai sekarang (PV) lebih besar dari M.

Persamaan Tingkat Pengembalian Modal.

$$M = \frac{Y_1}{(1+R)^1} + \frac{Y_2}{(1+R)^2} + \frac{Y_3}{(1+R)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+R)^n}$$

Keterangan:

M adalah nilai modal yang diinvestasikan

Y1, Y2, ... Yn adalah pendapatan neto (keuntungan diperoleh dari tahun 1 hingga ke tahun n.

R adalah tingkat pengembalian modal.

Dalam persamaan nilai modal, nilai yang akan dihitung adalah tingkat pengembalian modal (R), karena M dan Y1 hingga Yn sudah diketahui nilainya. Suatu investasi dipandang menguntungkan apabila nilai R lebih besar daripada tingkat bunga.

Kedua pendekatan tersebut bersifat komplementer artinya yang satu melengkapi yang lainnya. Dalam pendekatan nilai sekarang seorang pengusaha (investor) dapat dengan cepat mengetahui perbedaan nilai di antara investasi yang dilakukan dengan nilai sekarang dari aliran pendapatan neto yang akan diterima di masa datang.

Adapun pendekatan tingkat pengembalian modal dapat menunjukkan besarnya perbedaan di antara suku bunga yang berlaku dengan tingkat pengembalian modal dari proyek yang direncanakan. Dalam teori ekonomi kedua pendekatan ini penting, karena ia dapat membantu menerangkan hubungan di antara <sup>13</sup> suku bunga dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu.

Ada dua faktor utama yang memengaruhi volume investasi yaitu suku bunga (*the rate of interest*) dan *marginal efficiency of capital* (MEC), seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Suku bunga adalah tingkat harga dari uang, seberapa persenkah akan dikembalikan/dibayarkan karena dipakainya uang. Dua kekuatan ini akan terjadi tarik menarik serta saling berpengaruh dalam menentukan volume investasi (Rosyidi, 2004:176).

Tingkat pengembalian suatu barang modal disebut *Marginal Efficiency of Capital* (MEC atau  $r$ ). Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian suatu barang modal ( $MEC=r$ ) dapat dilakukan <sup>37</sup> dengan jalan mencari diskonto yang menyamakan antara harga barang modal dengan pendapatan-pendapatan yang diharapkan dari pengoperasian barang modal tersebut ditambah nilai sisanya.

Keputusan untuk membeli barang modal (*investasi riil*) menurut Keynes dalam Rosyidi (2004:177) menyatakan bahwa investasi tergantung dari tingkat bunga yang dibandingkan MEC (*marginal efficiency of capital*) yang menunjukkan keuntungan pembelian

suatu barang modal. Tingkat bunga menunjukkan biaya modal yang dipinjam, atau menunjukkan biaya oportunitas bagi pemilik modal. Adapun kriteria pengambilan keputusan dilaksanakan atau tidaknya suatu jenis investasi riil dapat berpatokan pada kriteria di bawah ini.

- Apabila  $r > i$ ; proyek investasi tersebut layak dilaksanakan karena menguntungkan.
- Apabila  $r = i$ ; proyek investasi boleh dilaksanakan atau tidak, tergantung prospek di masa mendatang dari investasi tersebut.
- Apabila  $r < i$ ; investasi tidak layak untuk dilaksanakan karena merugi.

Di mana  $r$  adalah keuntungan (*revenue*) yang diperoleh selama periode investasi dilaksanakan atau disebut MEC (*marginal efficiency of capital*). Adapun  $i$  adalah suku bunga (*interest*). Semakin tinggi MEC dari suatu proyek investasi, makin besar pula kemungkinan proyek investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Semakin tinggi MEC suatu proyek, maka semakin tinggi kemungkinan proyek investasi tersebut memberikan keuntungan bagi investor. Keputusan untuk membeli barang modal tidak hanya tergantung pada MEC (atau nilai  $r$ ) akan tetapi juga tergantung dari tingkat bunga ( $i = \text{external rate of return}$ ) yang besar kecilnya ditentukan oleh faktor luar, yaitu sektor perbankan.

Menurut Samuelson (2004:140), kekuatan yang berada di balik keputusan investasi sebagai berikut. Bisnis berinvestasi untuk memperoleh laba. Karena barang dan modal dapat bertahan bertahun-tahun. Keputusan investasi bergantung, pertama, permintaan untuk output yang dihasilkan oleh investasi baru; kedua, suku bunga dan pajak yang memengaruhi biaya investasi, dan ketiga, ekspektasi bisnis mengenai keadaan perekonomian.

Bahwa komponen investasi itu bisa berupa investasi sosial, investasi pemerintah, dan investasi tidak berwujud dalam bentuk investasi modal manusia dan peningkatan

pengetahuan. Mengapa Pemerintah daerah berinvestasi, tentu berharap bahwa keputusan investasi itu akan memberikan laba (*profit*), yaitu membawa hasil lebih besar daripada biaya investasi (*cost*).

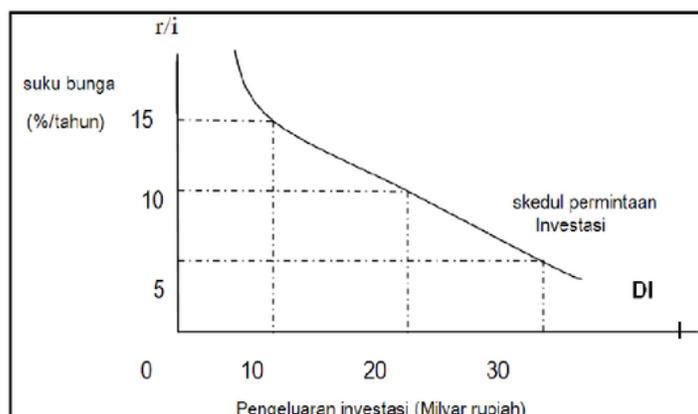
Samuelson (2004:141) menyatakan ada tiga elemen penting penentu dalam berinvestasi yaitu, pertama, hasil (*revenue*), kedua, biaya (*cost*), dan ketiga, ekspektasi (*expectation*). Penentu pertama, investasi akan memberikan kepada pemerintah daerah hasil tambahan jika investasi dapat membantu pemerintah daerah lebih banyak menghasilkan produk.

Ini mengisyaratkan bahwa keseluruhan output (atau GDP) akan merupakan penentu penting dari investasi. Investasi di daerah akan bergantung revenue yang akan dihasilkan aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Penentu kedua dari investasi itu adalah biaya berinvestasi. Para investor seringkali mengumpulkan dana untuk membeli barang-barang modal dengan cara meminjam. Biaya pinjaman ini biasanya berupa suku bunga. Suku bunga merupakan harga yang dibayar untuk meminjam uang untuk suatu periode waktu tertentu.

Pajak juga berpengaruh penting terhadap investasi. Jika suku bunga pinjaman dan tarif pajak diturunkan, respon para investor akan ramai-ramai meningkatkan investasinya di berbagai sektor sesuai yang diinginkan pemerintah daerah.

Sebaliknya jika tarif pajak dan suku bunga meningkat, para investor akan mengurangi di sektor riil yang selanjutnya mungkin akan mengalihkan dananya ke sektor finansial. Kurva permintaan investasi terlihat pada Gambar 2.3. berikut.



**Gambar 2.3.** Kurva Permintaan Investasi.

Sumber: Samuelson (2004:142)

Elemen ketiga penentu investasi adalah ekspektasi laba dan kepercayaan bisnis. Investasi merupakan spekulasi atas masa depan. Dengan harapan bahwa revenue dari suatu investasi akan melebihi biayanya. Investor akan terdorong berinvestasi di daerah tersebut jika ada kepercayaan bisnis, karena pada prinsipnya bagaimana para investor memperkecil risiko dan ketidakpastian.

Kepercayaan bisnis tersebut misalnya adanya kepastian hukum, adanya regulasi atau aturan yang pasti dan memberi kebebasan, keleluasan kepada para investor untuk mengembangkan bisnisnya di daerah. Misalnya perizinan yang tidak berbelit-belit memperpanjang jalur birokrasi, sehingga kesannya mempersulit datangnya para investor di daerah. Penanaman modal untuk investasi di daerah sangatlah penting demi mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian di daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kesejahteraan masyarakat.

Perlu diingat bahwa pemerintah, swasta, maupun perorangan yang melakukan investasi tidak dapat menghindari dari risiko investasi. Faktor risiko ada pada setiap keputusan. Kemungkinan menanggung risiko investasi itu ada, tetapi bagaimana caranya

dapat meminimalkan. Semua investor hampir dapat dipastikan akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dan bagaimana caranya untuk meminimalisir risiko tersebut.

Besar kecilnya risiko investasi itu tergantung pada kelihaiian investor dalam mengendalikan kegiatan ekonominya. Menurut Ahmad (1996:4) timbulnya risiko investasi bisa bersumber dari berbagai banyak faktor, misalnya kenaikan suku bunga, salah kelola, likuiditas, industri, atau politik. Faktor itu bisa muncul secara bersamaan, bergantian atau muncul dari salah satu faktor saja.

## Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah sering disebut juga investasi sektor publik. Definisi investasi pemerintah <sup>15</sup> menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri <sup>5</sup> Nomor 13 Tahun 2006 adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PP No.8/2007 menyebutkan investasi <sup>10</sup> pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau barang oleh pemerintah pusat/daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Investasi di sini ditekankan pada penggunaan aset. Aset pemerintah (pusat/daerah) khususnya aset tetap diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut Belanja Modal. Dalam PP <sup>9</sup> 58/2005 disebutkan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Belanja Modal (dalam <sup>22</sup> Permendagri 13/2006) didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. <sup>11</sup> Setiap belanja modal merupakan investasi, karena secara teoritis dapat dipastikan akan ada manfaatnya.

Sopyan dalam Halim (2007:112) berpendapat bahwa investasi pemerintah daerah tercermin melalui belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi pengeluaran. Belanja modal menurut Halim (2007:5-7) adalah "capital expenditure" yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran seperti itu memerlukan sebuah proses penilaian/penaksiran yang disebut Jones dan Pendlebury sebagai "investment appraisal".

Kebutuhan investasi publik dibatasi oleh keterbatasan anggaran yang disediakan dan ditetapkan. Usulan investasi pemerintah dapat berbentuk (a) investasi penggantian, (b) investasi penambahan kapasitas, dan (c) investasi baru. Ada beberapa perbedaan penilaian dalam menilai biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) investasi pemerintah (*public sector*) dengan investasi swasta (*private*).

Karena investasi pemerintah tidak hanya diukur oleh aspek finansial saja seperti suku bunga, inflasi, risiko, dan ketidakpastian saja, akan tetapi dinilai dari banyak aspek lainnya seperti aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek keamanan, dan aspek distribusi. Aspek-aspek inilah yang sulit dihitung dalam investasi sektor publik. Terlepas dari itu investasi pemerintah melalui belanja modal sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi daerah adalah investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta (APKASI,2001:2). Investasi oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari segi investasi fisik dan investasi nonfisik. Investasi fisik antara lain pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah berupa penyediaan layanan kesehatan, penyediaan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia

sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal *human investment*.

Disamping kedua jenis investasi tersebut, pemerintah daerah beinvestasi bisa melalui pembentukan BUMD atau penyertaan modal pada dunia usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Investasi pemerintah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Banyaknya investasi pemerintah dan swasta di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah juga berkewajiban membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah. Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong investasi di daerah.

<sup>8</sup> Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan dapat

mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor. Memberdayakan investasi di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah sangat diperlukan kerjasama antardaerah. Iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di daerah.

Menurut Halim (2004:107), investasi adalah salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik berbentuk badan usaha, badan hukum maupun usaha perorangan. Semua lapisan masyarakat tidak terkecuali pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perorangan maupun perbankan menghendaki terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang iklim investasi, yaitu Inpres RI No.3/2006 tentang paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang ditujukan kepada para menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.

Iklim investasi yang kondusif tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi (LKER,2007:5). Faktor ekonomi meliputi seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, infrastruktur dasar. Sedangkan faktor non-ekonomi antara lain meliputi kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan, tingkat kriminalitas, demonstrasi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan perbankan, infrastruktur dasar, dan layanan birokrasi pemerintah daerah.

Menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN,2003) meskipun suatu daerah memiliki sumberdaya alam yang minim, tetap akan menarik investor kalau kelembagaan di daerah tersebut sudah baik dan mendukung iklim investasi. Iklim yang baik bagi investasi adalah jaminan keamanan, kepastian hukum, dan kepastian berusaha. Peta investasi daerah di

Indonesia 2003 masih menyoyal kepastian hukum, keamanan, dan pungutan preman.

Hasil Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti kondisi sosial politik, kondisi ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja dan infrastruktur fisik. Dalam Halim (2007:110), ada tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha (1) penyederhanaan sistem dan perizinan, (2) penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, serta (3) transparansi biaya perizinan.

Investasi adalah menanamkan aset riil maupun aset finansial ke dalam berbagai instrumen investasi (*portofolio*) dengan harapan di masa mendatang dapat meningkatkan nilai aset tersebut menjadi lebih besar (*expected return*). Investasi Pemerintah menurut SAP-2005 (Halim,2007:114) adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan investasi dibagi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu pengeluaran untuk perolehan aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : (a) kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Rijal dalam Halim (2007:115) menyatakan bahwa investasi sektor publik sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah

daerah dalam investasi bisa menciptakan multiplier effect yang mendorong investor swasta untuk berbisnis yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Selain itu sebagai regulator pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pelayanan dan proses perizinan yang cepat tanggap.

Secara kelembagaan diperlukan penataan kembali terhadap institusi yang ada dan terlibat dalam proses penciptaan iklim investasi yang baik, mulai dari lembaga pelayanan dan perizinan satu atap (*one stop service/OSS*) sampai proses akuntansi yang baik dan menguntungkan daerah. Pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bentuk belanja modal yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah.

## Belanja/Pengeluaran Pemerintah

Belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah penggunaan barang-barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber daya ekonomi (Budiono,1999:50).

Belanja pemerintah digolongkan menjadi dua, yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno,2000:38). Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan, beli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi. Di Indonesia pengeluaran konsumsi tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi tercermin dalam pengeluaran pembangunan.

Menurut Sukirno (2000:151-152), jumlah pengeluaran pemerintah dalam periode tertentu itu tergantung beberapa faktor, antara lain (a) jumlah pajak yang diramalkan, (b) tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, dan (c) pertimbangan politik dan stabilitas negara.

Faktor pertama, penentu besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak. Pemerintah harus mampu memprediksi seberapa besar pajak yang akan diterima. Makin besar jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, semakin besar pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

Faktor kedua, kegiatan ekonomi akan diatur ke arah yang diinginkan pemerintah,

misalnya mengurangi pengangguran, menghindari inflasi, dan percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang akan menarik swasta berinvestasi dan memicu pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak terbatas, pinjaman asing atau swasta dalam negeri dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, jalan-jalan, irigasi, sarana pendidikan, dan kesehatan, sehingga pada gilirannya kegiatan ekonomi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja.

Faktor ketiga, stabilitas politik dan keamanan akan berpengaruh pada besaran anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik dan keamanan negara menyebabkan kenaikan belanja pemerintah terutama bila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman negara asing dapat menimbulkan belanja peralatan militer meningkat.

Menurut Departemen Keuangan RI (PP No.39/2007), pengeluaran pemerintah dibagi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin (*current expenditure*) dan pengeluaran pembangunan (*capital expenditure*). Pengeluaran rutin bertujuan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dengan tetap mengacu kepada efisiensi dan efektifitas, serta mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembangunan atau investasi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran yang akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat ekonomi selanjutnya. Pengeluaran pembangunan merupakan investasi pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi secara nasional melalui pembangunan di berbagai proyek sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sesuai yang direncanakan. Pengeluaran pembangunan antara lain digunakan untuk membiayai proyek fisik dan nonfisik. Proyek fisik seperti pembangunan proyek-proyek *overhead* dan *public utilities*. Proyek nonfisik seperti *up-grading*, diklat pimpinan, dan pembinaan mental masyarakat.

Sifat dari **pengeluaran pemerintah** dibagi dua jenis yaitu *exhaustic expenditure* dan *transfer payment* (Suparmoko,2001:24-32). *Exhaustic expenditure* adalah pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun menghasilkan barang lain lagi. Dengan kata lain mengalihkan faktor produksi dari satu sektor swasta ke pemerintah. Sedangkan *transfer payment* merupakan pemindahan kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada negara sebagai hadiah (*grants*).

Menurut Suparmoko (2001:23), peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan beberapa hal berikut:

- a. Pengeluaran untuk barang dan jasa disebabkan perubahan teknologi (teknis), perubahan populasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan urbanisasi.
- b. Perubahan ruang lingkup transfer, *transfer payment* bertujuan menyeimbangkan besarnya distribusi pendapatan (asuransi, kesejahteraan) sehingga mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah.
- c. Faktor sosial dan politik. Jika terjadi perubahan sosial dan pergeseran kekuatan politik berakibat pada pertimbangan individu dalam memilih pemerintahan dan keputusan politik menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah.
- d. Tersedianya dasar pengenaan pajak. Dengan pengenaan pajak, pendapatan akan meningkat yang akan berpengaruh pada peningkatan pengeluaran pemerintah.
- e. Pengaruh awal dan pembiayaan perang. Jika perang terjadi, pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Misalnya banyak anak yatim ditinggal mati atau karena membutuhkan biaya untuk membayar pinjaman yang digunakan perang.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijaksanaan pemerintah, karena **27** **pengeluaran pemerintah** merupakan **biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk**

melaksanakan kebijaksanaan atas pembelian barang dan jasa. Pemerintah daerah untuk menambah aset-asetnya, baik aset riil maupun aset finansialnya akan melakukan pembelanjaan yang sumber dananya dikeluarkan melalui anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama antara gubernur/bupati/walikota dan DPRD di daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun kepala daerah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diartikan sebagai alat atau sarana utama untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah karena anggaran itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah (Permendagri No.59/2007).

Menurut Richard A Musgrave dalam Suparmoko (2001:26), anggaran sebagai alat kontrol atau pengawasan. Anggaran mempunyai 3 (tiga) macam fungsi utama yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat, fungsi perbaikan distribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi perekonomian. Mardiasmo (2001:29) menambahkan bahwa ada tiga aspek dalam penyusunan anggaran: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik pemerintah daerah.

Permendagri No.13/2006 dan No.59/2007 menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah <sup>1</sup> **pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 bulan (satu tahun).** <sup>1</sup> **Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan SAP-2005 dalam Halim (2007:113-114) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP-2005).** <sup>4</sup> **Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi**

dan jaringan, dan fisik lainnya.

4

### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan/pengadaan/ penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian.

Peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah

kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan/pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi serta jaringan, termasuk juga ke dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2004:72), <sup>31</sup> belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri, pertama, <sup>8</sup> belanja publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

Kedua, belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode yang akan datang.

Menurut Halim (2004:73-74), prinsip-prinsip pengeluaran daerah mencakup akuntabilitas dan value for money. Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan

segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan penggunaan uang publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan masyarakat luas. Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para petinggi di daerah adalah, pertama, aspek legalitas <sup>15</sup> pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.

Kedua, pengelolaan (*stewardship*) atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah: <sup>30</sup> (a) adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (c) pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasikan pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

Adapun konsep *value of money* harus mendasarkan pada: (a) nilai ekonomis dengan cara meminimalisir biaya dan mengoptimalkan keuntungan, (b) efisiensi berkaitan <sup>34</sup> erat dengan efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Proses operasional dapat dikatakan efisien bila suatu target tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan biaya yang serendah-rendahnya.

<sup>1</sup> Efektivitas merupakan kaitan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Pemerintah daerah harus menyelesaikan kegiatan tepat pada waktunya dan dalam batas anggaran yang tersedia.

Menurut Lin (1994) dalam Masjkuri (2008), tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan pengeluaran pemerintah pada tingkat tinggi pula. Barro (1990)

berpendapat bahwa pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah untuk investasi dan kegiatan produktif lainnya dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam beberapa hal pengeluaran pemerintah justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.<sup>24</sup>

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kajian menarik, juga fenomena penting dalam perekonomian. Pengeluaran sektor publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau justru sebaliknya. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur fisik maupun nonfisik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Kegiatan pemerintah secara langsung maupun tidak bisa memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah output yang berinteraksi dengan sektor privat (swasta).

Menurut BKPM (2004) bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik penanaman modal untuk melakukan investasi di Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004<sup>8</sup> tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Untuk melaksanakan itu maka keluarlah Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK./2004 Tanggal 20 Juli 2004 yang mengatur tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Misalnya dalam SK tersebut secara teknis telah diatur antara lain perizinan usaha, persetujuan, perubahan dari mulai status kepemilikan, lokasi proyek, jenis usaha, kapasitas produksi, perluasan, peralihan, penggabungan (*merger*), keberadaan kantor perwakilan asing, batasan jenis produksi pertambangan di luar minyak dan gas bumi bagi PMA dan PMDN, tenaga kerja asing, sumber pembiayaan, sampai dengan adanya sanksinya baik bagi PMDN

maupun PMA.

Dalam pengukuran pengeluaran investasi daerah di sini adalah belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperluas kekayaan (aset) daerah dan memperbesar nilai kekayaan daerah (*value*) di masa mendatang, baik dalam bentuk real assets maupun financial assets sehingga pendapatan daerah bisa meningkat. Penambahan kekayaan daerah ini bisa berupa tanah, perusahaan daerah (BUMD), pabrik, gedung, atau lainnya yang disewakan. Kekayaan tersebut bisa juga berupa barang atau hasil sektor jasa. Kekayaan berupa aset riil dan aset finansial. Laba atau bunga dari hasil perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Dengan harapan jika aset, nilai aset dan pendapatan daerah meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka pada gilirannya kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat.

## Teori Tenaga Kerja dan Kebijakan Pengupahan

Dalam mikroekonomi (Samuelson, 2003:261) disebutkan bahwa salah satu faktor produksi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kapasitas produksi adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja (*labour*). Di pasar tenaga kerja akan terjadi tarik menarik antara kepentingan permintaan akan tenaga kerja (*demand labour*) dengan penawaran tenaga kerja (*supply labour*).

Rumah tangga harus menyediakan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebaliknya perusahaan (*bussiness*) harus mampu membayar upah (*sallary/wage*) sesuai keinginan tenaga kerja. Fluktuasi naik dan turunnya upah tenaga kerja, akan berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja.

Kemajuan teknologi bisa memberi dampak positif untuk meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga sekaligus membawa dampak negatif pada kuantitas penyerapan tenaga kerja. Padat modal dan padat karya adalah suatu kebijakan. Sisi positif teknologi adalah ongkos produksi menjadi lebih efisien. Sisi negatifnya jika negara atau perusahaan menerapkan kebijakan padat modal, jumlah tenaga kerja menjadi objek kurang beruntung.

Apabila ini terjadi dalam satu atau dua perusahaan mungkin tidak menjadi masalah akan tetapi apabila terjadi hampir di semua perusahaan dalam suatu negara mengadakan pemutusan hubungan kerja/pemberhentian tenaga kerja besar-besaran, ini bisa membahayakan keadaan sosial-politik. Akibatnya pengangguran besarbesaran, demonstrasi di mana-mana, gangguan psikologis, kemampuan daya beli menjadi turun, produk nasional bruto ikut menjadi turun, sehingga pada gilirannya secara nasional akan menurunkan pendapatan

nasional dan pertumbuhan ekonomi.

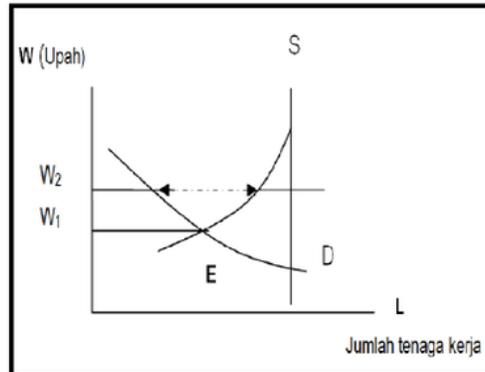
Dalam keadaan seperti ini biasanya pemerintah akan menerapkan program padat karya dan menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor dengan mendorong para pengusaha untuk berinvestasi di berbagai sektor ekonomi dengan cara menurunkan suku bunga dan subsidi pajak. Diharapkan dampak kebijakan itu bisa terbukanya lapangan pekerjaan dengan lahirnya pabrik-pabrik baru. Oleh karena itu faktor produksi tenaga kerja sangat penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi. Pengendalian perilaku pengusaha yang cenderung melakukan efisiensi pada padat modal dan perilaku tenaga kerja yang menaikkan upah yang tidak proporsional adalah kewajiban pemerintah untuk ikut campur dalam mengendalikan stabilitas penawaran dan permintaan akan tenaga kerja.

Tenaga kerja (*manpower*) sangat penting peranannya untuk meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas. Caranya dengan meningkatkan tingkat pendidikan para tenaga kerja atau pelatihan-pelatihan untuk kecakapan bekerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Di pasar tenaga kerja, permintaan/kebutuhan total tenaga kerja dari sektor dunia usaha dan pemerintah akan bertemu dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia waktu itu. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, jika semua orang dan pekerjaan benar-benar sama, tidak akan ada perbedaan upah. Tingkat upah equilibrium ditentukan oleh permintaan dan penawaran seimbang.

Bila tuntutan upah karyawan terlalu tinggi sedangkan kemampuan perusahaan untuk

membayar upah kepada karyawan di bawah tuntutan karyawan, ini mengakibatkan permintaan terhadap jumlah karyawan menjadi menurun.



Gambar 2.5. Pasar tenaga kerja dalam kondisi upah tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja.  
Sumber: Samuelson (2003:298).

Kurva gambar 2.5 menunjukkan keadaan upah tinggi yang mengakibatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Samuelson (2003:300) memberi contoh di Jerman. Dampak upah riil terlalu tinggi setelah unifikasi ekonomi Jerman tahun 1990 yang menetapkan upah di Jerman Timur sekurang-kurangnya dua kali lipat tingginya level upah yang sesuai nilai produk marjinal tenaga kerja (*labors marginal revenue product*) yang mengakibatkan penurunan lapangan kerja. Jika upah riil terlalu tinggi maka mengakibatkan pula tingginya angka pengangguran.

Bila tenaga kerja menginginkan kenaikan upah riil terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan menurunkan peluang kesempatan kerja di perusahaan, karena penawaran dan permintaan tidak seimbang. Akhirnya jumlah pengangguran meningkat. Jika ini yang terjadi maka pemerintah dapat memengaruhi tingkat harga upah. Bagi tenaga kerja diharapkan jangan terlalu tinggi permintaan tarif upahnya, dan bagi perusahaan jangan terlalu rendah menawarnya. Misalnya di Indonesia sudah ada departemen tenaga kerja yang

mempertemukan antara serikat pekerja dengan para pengusaha seperti dalam menentukan upah pekerja minimum regional di masing-masing provinsi/daerah.

Menurut Samuelson (2003:301), ada beberapa pemikiran keliru mengenai teori upah tenaga kerja dan kebijakan pasar tenaga kerja. Seperti di Eropa tahun 1990- an terjadi pengangguran sangat tinggi, para pemimpin buruh dan para politikus menyarankan solusinya adalah mengurangi jam kerja mingguan sehingga jumlah jam kerja akan dikerjakan oleh seluruh angkatan kerja. Pandangan ini disebut "pemikiran keliru tentang tenaga kerja" (*the lump of labor fallacy*).

Bagi kelompok pekerja tertentu yang tidak memiliki keterampilan khusus dan tinggal di satu wilayah, pengurangan jumlah permintaan tenaga kerja bisa menjadi ancaman terhadap pendapatan mereka. Dari sudut pandang ekonomi pemikiran tersebut mengimplikasikan bahwa tersedia begitu banyak pekerjaan menguntungkan untuk dilakukan namun dalam kenyataannya tidak demikian. Di berbagai negara jika terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja dapat diakomodasi dengan tersedianya lapangan pekerjaan lebih tinggi, walaupun akan menimbulkan upah riil yang lebih rendah. Jika terjadi penurunan permintaan jenis tenaga kerja akibat pergeseran teknologi dalam suatu industri dapat disesuaikan dengan upah relatif yang lebih rendah dan migrasi tenaga kerja dan modal secara perlahan akan menyediakan pekerjaan baru bagi para pekerja yang digantikan.

Budiono (1990:9) menyatakan jika ingin mengamati pasar tenaga kerja, ada hal-hal yang harus dipelajari perilakunya antara lain tingkat upah rata-rata, jumlah orang yang bekerja (*employment*) dan jumlah pengangguran (*unemployment*). Sedangkan secara empiris dalam kenyataan dapat diamati angka-angka statistiknya yang meliputi indeks-indeks upah di berbagai sektor ekonomi, jumlah orang yang bekerja di berbagai sektor, jumlah angkatan

kerja, dan angkatan kerja minus orang yang bekerja.

Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan pengupahan. Definisi upah/gaji bersih menurut BPS adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih adalah penerimaan setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan (BPS,2007b:xviii).

Secara konstitusional sudah tercantum dalam peraturan hubungan industrial bahwa kebijakan pengupahan harus bisa menjamin standar kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Upah sebagai balas jasa dari hasil kerjanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, menguntungkan dalam kehidupannya serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Ada beberapa istilah ketenagakerjaan yang perlu diketahui dalam pembahasan teori ketenagakerjaan, misalnya usia kerja, tenaga kerja (*manpower*), angkatan kerja (*labour force*), penganggur (*unemployment*). Usia kerja maksudnya adalah posisi usia yang seharusnya orang tersebut bekerja dan memiliki penghasilan. Badan Pusat Statistik menyebutkan yang termasuk usia kerja di Indonesia adalah 10 tahun ke atas, yang kemudian tahun 1998 dinaikan menjadi usia 15 tahun ke atas.

Menurut Mantra (2004:224) setiap negara biasanya menggunakan batasan umur berbeda-beda, tetapi yang sering dijadikan dasar pertimbangan adalah keadaan perekonomian dan situasi tenaga kerja. Semakin maju perekonomian di suatu negara/daerah batas umur yang ditentukan usia kerja minimum semakin tinggi.

Simanjuntak (1985:10) mengatakan bahwa <sup>32</sup> tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Soeroto (1986:10) berpendapat <sup>1</sup> tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Dumairy (1996:75) yang disebut <sup>25</sup> angkatan kerja adalah tenaga kerja/penduduk yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Adapun yang bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja/penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, misalnya para pelajar, ibu rumah tangga, para pensiun dan penderita cacat. Adapun yang disebut penganggur adalah angkatan kerja yang telah memasuki usia kerja, tetapi belum terserap di dunia kerja atau masih mencari pekerjaan (BPS, 2007b:30)

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan pasar tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan partisipasi angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu diketahui tingkat partisipasinya. Persentase angkatan kerja terhadap tenaga kerja disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu daerah dapat dihitung dengan formula berikut.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{AK}}{\text{TK}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja AK adalah angkatan kerja

TK adalah tenaga kerja

Penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Angka pengangguran adalah persentase (%) jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Sukirno (2000:472) mendefinisikan pengangguran (unemployment) <sup>11</sup> adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Berdasarkan kepada keadaan yang menyebabkan pengangguran biasanya dibedakan kepada tiga jenis: friksional, struktural, dan konjungtur. Pengangguran friksional (*frictional/search unemployment*) disebabkan tindakan meninggalkan kerja dan mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai keinginannya. Pengangguran struktural (*structural unemployment*) ini <sup>9</sup> disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah, kemunduran perkembangan ekonomi sesuatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat di kawasan lain.

Pengangguran konjungtur disebabkan karena siklus bisnis (*bussiness cycle*), pengurangan permintaan agregat dengan kesempatan kerja. Adapun formula umum untuk menghitung angka tingkat pengangguran sebagai berikut;

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{jumlah penganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Angka-angka hasil persamaan di atas sangat bermanfaat untuk mengamati bagaimana kondisi angkatan kerja pada pasar tenaga kerja saat itu. Pemahaman terhadap pasar tenaga kerja sangatlah penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan tentang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, dan kebijakan kependudukan.

## Kesempatan Kerja dan Penyerapan Angkatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia dan seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan ketentuan lapangan kerja (usaha) yang tersedia tersebut mencukupi dan seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada.

Pengertian lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari suatu usaha atau perusahaan/instansi (BPS,2007b:153). Lapangan pekerjaan/usaha utama ini biasanya dibagi tiga golongan: (a) sektor primer, (b) sektor sekunder, dan (c) sektor tersier. Secara terinci sektor lapangan pekerjaan/usaha utama tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air bersih
5. Bangunan (Konstruksi)
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

Angka penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha sangat penting untuk diketahui bagi perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Pemerataan kesempatan kerja

juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Pendapatan tenaga kerja meningkat. Jika ini yang terjadi maka produktivitas tenaga kerja juga akan menjadi meningkat. Peningkatan kapasitas produksi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi meningkat yang gilirannya akan diikuti laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan laju pertumbuhan ekonomi dengan laju kesempatan kerja dapat diketahui melalui penghitungan elastisitas kesempatan kerja. Adapun formula untuk menghitung tingkat elastisitas kesempatan kerja berikut.

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta PDRB}$$

Keterangan:

$E_{kk}$  adalah elastisitas kesempatan kerja.

$KK$  adalah laju pertumbuhan kesempatan kerja.

$PDRB$  adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Dalam analisis makroekonomi, indikator elastisitas kesempatan kerja ini kadang digunakan untuk memilih suatu kebijakan pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi dengan program padat karya atau padat modal. Jika terjadi peningkatan pengangguran, maka program padat karya yang dipilih.

Menurut Soeroto (1986:98-111), kebijakan kesempatan kerja dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dirumuskan empat macam kebijakan berikut;

- 1) Kebijakan kesempatan kerja umum; bertujuan untuk memberi dorongan pada perluasan kesempatan kerja atau menciptakan iklim usaha yang menguntungkan serta memperluas kesempatan kerja. Dorongan itu melalui instrumen kebijakan ekonomi dan keuangan, seperti perkreditan, perpajakan, bea masuk, suku bunga, nilai tukar mata uang, tingkat

harga, upah, pasar kerja, teknologi, pendidikan dan latihan.

- 2) Kebijakan kesempatan kerja sektoral; dilakukan untuk pembangunan sektoral dalam pembangunan nasional, daerah maupun desa. Ini diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja melalui pemilihan produk dan teknologi yang bersifat padat karya.
- 3) Kebijakan kesempatan kerja khusus ; sebagai program dan langkah-langkah kebijakan yang direncanakan khusus untuk memperluas kesempatan kerja dan penggunaannya untuk mengurangi pengangguran yang timbul sewaktu-waktu sebagai akibat musim, bencana atau serangan hama yang meluas.
- 4) Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya berfungsi sebagai perluasan kesempatan kerja di tiap-tiap daerah dan hubungan antar daerah. Pembangunan yang dilakukan daerah pada hakikatnya kebijakan kesempatan kerja akan mempunyai implikasi daerah dan implementasinya harus menjadi komponen pembangunan daerah.

Mengetahui kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur sangatlah penting diketahui para pengambil kebijakan sumber daya manusia, terutama untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan penempatan tenaga kerja suatu daerah sesuai lapangan usaha tersedia dan harus disediakan pemerintah daerah di masa mendatang.

## Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Juga diharapkan adanya penyebaran pembangunan yang lebih merata antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB dan pendapatan per kapita tidaklah cukup untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidaklah berkorelasi positif dalam menggambarkan pemerataan pendapatan. Bisa saja pertumbuhan itu terkumpul pada sekelompok orang (konglomeratisasi). Samuelson (2003:22) berpendapat bahwa di negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris dan Jepang memang pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kemajuan, karena memang pendapatan per kapita mereka jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita masyarakat di negara berkembang.

Indonesia ini masih tergolong pada kategori negara berkembang, pengangguran, angka kemiskinannya masih tergolong banyak. Pemakaian konsep GNP per kapita sebagai ukuran kemajuan pembangunan dan kesejahteraan banyak memiliki kelemahan. Tidaklah cukup pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hanya diukur oleh bertambahnya barang dan jasa saja, akan tetapi perlu ada peningkatan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita masyarakat.

Sesuai pemikiran Amartya K.Sen dalam Pressmen (2000:271) tentang indikator sosial ekonomi dalam konsep "kapabilitas" menyatakan pemerintah harus mengukur secara konkret kapabilitas (kemampuan) warga negaranya. Kemampuan akan tercipta bila "*functionings*" (fungsi/potensi) yang ada di setiap individu diberdayakan, salah satunya adalah

memperoleh pendidikan. Bila pendidikan sudah diperoleh individu maka *functionings* tersebut dapat digunakan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya.

Konsep Sen mengenai "ekonomi kesejahteraan" menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah perihal hak individu, perundangan, ketersediaan informasi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Metode pengukuran tingkat kemiskinan (*methods of measuring poverty*) sangat membantu dalam memberikan informasi guna meningkatkan kondisi ekonomi agar bebas dari kemiskinan.

Mubyarto (1997:188) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran yang sudah dirasakan merata oleh seluruh warga masyarakat. Dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin berhasil, maka kesenjangan sosial akan berkurang, termasuk di dalamnya keberhasilan meningkatkan kemakmuran penduduk yang masih hidup dalam serba kekurangan. Menurut Albert, Hahnel dalam Darussalam (2005:77) teori kesejahteraan dapat diklasifikasikan tiga macam: *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new construction approach*.

*Classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan dapat bertambah. Tingkat kesenangan (*pleasure*) yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip perorangan sedapat mungkin terus meningkatkan kesejahteraannya. Berbeda dalam masyarakat, kelompoknyalah yang harus ditingkatkan kesejahteraannya.

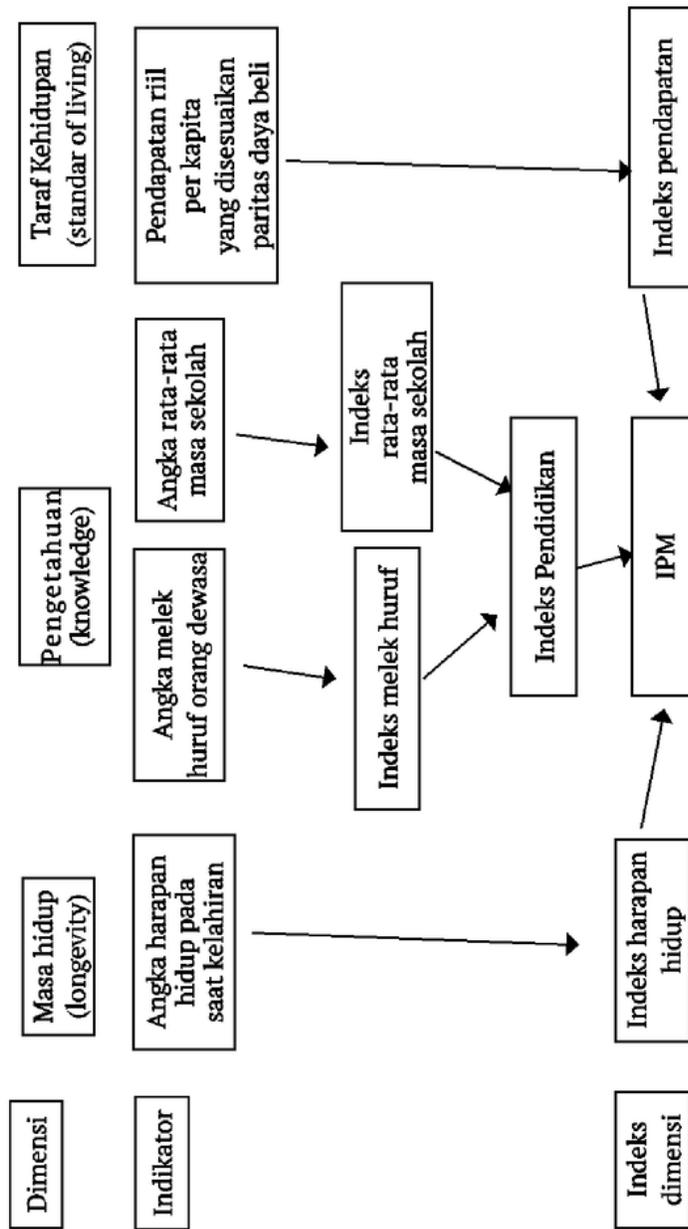
*Neoclassical welfare* merupakan teori kesejahteraan yang populer dengan *Pareto optimality* bahwa fungsi kesejahteraan sosial maksimum adalah merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Adapun *new contractarian approach* dimana individu rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum yang jelas dalam hidupnya. Produksi barang dan jasa

yang menjadi tugas individu dan tugas sosial konsepnya harus jelas. Individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep dirinya tanpa campur tangan dari yang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa tingkat kesejahteraan individu maupun masyarakat selalu berkaitan dengan kesenangan (*pleasure*) dan kepuasan (*utility*) yang dapat diperoleh dalam kehidupannya. Untuk mencapai hal itu maka sangat dibutuhkan adanya perubahan perilaku yang diarahkan kepada pemenuhan kepuasan dan kesenangan tersebut.

Tentu saja harus disesuaikan dengan sumberdaya faktor produksi yang tersedia. Ternyata dalam kenyataannya bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari banyak indikator dan dimensi yang dapat diukur, misalnya ada indeks pembangunan manusia/HDI dari UNDP tahun 1990, indeks kualitas hidup/*Physical Quality of Life Index* (PQLI) dari Morris D Morris atau indikator.

Susenas Inti (*Core Susenas*) yang merupakan indikator campuran antara sosial dan ekonomi dari BPS 1992. Dimensi dan indikator dalam Indeks IPM dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut.



**Gambar 2.6.** Dimensi dan indikator indeks pembangunan manusia.

Sumber: BPS-Bappenas-UNDP, (2001:147) Indonesia Human Development Report.

Menurut Todaro (2004:68), untuk melihat keberhasilan pembangunan, maka UNDP mencoba memeringkatkan negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari skala 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi). Pemeringkatan tersebut berdasarkan tiga tujuan akhir produk pembangunan: pertama, masa hidup (*longevity*) merupakan dimensi kesehatan yang <sup>2</sup> diukur dengan usia harapan hidup; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga); ketiga, standar kehidupan (*standar of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) <sup>16</sup> dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marginal yang semakin menurun dari pendapatan.

Teori Indeks Kualitas Hidup (*Physical Quality Life Index/PQLI*) dari Morris D. Morris. PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari tiga indikator, yaitu (1) tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, (2) angka kematian, dan (3) tingkat melek huruf. Kinerja ekonomi daerah diukur dengan skala satu hingga seratus. Di mana angka satu merupakan kinerja ekonomi terjelek, sedangkan angka seratus kinerja ekonomi terbaik.

**Tabel 2.1**  
**Nilai maksimum dan minimum komponen IPM**

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan kombinasi Gross Enrolment Ratio (GER)
Daya Beli	737.720	300.000 (1996) 360.000 (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

Sumber: BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001-147).

Maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ketiga indikator, dengan memberikan bobot sama untuk masing-masing indikator.

Studi yang dilakukan Morris dalam Todaro (1999:75) dengan PQLI mendapatkan bahwa negaranegara yang GNP (*Gross National Product*) per kapitanya rendah cenderung memiliki PQLI rendah pula. Sedangkan negara-negara yang GNP per kapitanya tinggi cenderung memiliki PQLI tinggi pula.

*Human Development Index* (HDI) dari *United Nations Development Programme* (UNDP-2001:12) untuk pengukuran kesejahteraan masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi). HDI mencoba meranking semua daerah dalam pembangunan manusia dengan skala 0-1. Skala 0 menunjukkan pembangunan manusia terendah dan satu menunjukkan pembangunan yang tertinggi.

Indikator kesejahteraan ini berdasarkan pada <sup>12</sup> tiga tujuan atau produk pembangunan, yaitu usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca diberi bobot dua

pertiga dan rata-rata sekolah diberi bobot sepertiga, dan penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil menurut kemampuan daya beli.

Todaro (1999:77) HDI (Human Development Index) dibagi menjadi tiga kategori: 0,00 - 0,50 adalah pembangunan manusia rendah; 0,51 - 0,79 adalah pembangunan manusia sedang; 0,80 - 1,00 adalah pembangunan manusia tinggi. Indikator indeks pembangunan manusia ini menurut UNDP diformulasikan berikut ini.

$$HDI = \frac{1}{3} (IndexX_1 + IndexX_2 + IndexX_3)$$

$$IndexX_{(i,j)} = (IndexX_{(i,j)} - IndexX_{(i,min)}) / (X_{(i,max)} - X_{(i,min)})$$

Di mana HDI merupakan indeks pembangunan manusia. X1 adalah usia harapan hidup, X2 adalah tingkat pencapaian pendidikan dan X3 merupakan standar hidup layak. Masing-masing indeks berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum yang telah distandarisasi seperti dalam Tabel 2.1.

Dalam Arsyad (2004a:38) pada tahun 1992 BPS telah mengembangkan indikator kesejahteraan yang disebut indikator Susenas Inti (Core Susenas) yang merupakan indikator campuran antara sosial dan ekonomi meliputi pertama, pendidikan dengan indikator tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan; kedua, kesehatan, indikatornya rata-rata sakit, fasilitas kesehatan; ketiga, perumahan, sumber air bersih dan listrik, sanitasi, mutu rumah tinggal; keempat, angkatan kerja, indikatornya antara lain, partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, status pekerjaan; kelima, keluarga berencana dan fertilitas, indikatornya a.l. penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi; keenam, ekonomi: tingkat konsumsi per kapita; ketujuh, kriminalitas dengan indikatornya jumlah

pencurian per tahun, jumlah pembunuhan per tahun, jumlah perkosaan per tahun; kedelapan, perjalanan wisata, frekuensi perjalanan wisata per tahun; kesembilan, akses ke media massa, indikatornya jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi.

Sasaran pembangunan daerah hendaknya tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan per kapita saja. Akan tetapi juga dengan membuat perencanaan pembangunan yang mengarah kepada pengurangan angka pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan kesejahteraan lainnya.

## Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Mangkoesoebroto (2001:2) <sup>17</sup> dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu pertama, peranan alokasi: pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi; kedua, peranan distribusi; dan ketiga, peranan stabilisasi.

<sup>2</sup> Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan partisipasi masyarakat dan kinerja daerah yang berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu mengenali potensi ekonomi daerahnya, dan sekaligus harus mampu mengelolanya dengan baik. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Darwanto (2007:1-7) bahwa ada dua prinsip dasar dalam pembangunan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan, pertama, mengenali potensi ekonomi wilayah; kedua, merumuskan manajemen pembangunan daerah yang probisnis.

Secara terperinci dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengenali potensi ekonomi wilayah ini meliputi (a) perkembangan penduduk dan urbanisasi, (b) sektor pertanian, (c) sektor pariwisata, (d) kualitas lingkungan, dan (e) keterkaitan wilayah dan aglomerasi. Sedangkan pemerintah daerah harus merumuskan manajemen pembangunan yang probisnis, artinya pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, antara lain (a) mampu menyediakan informasi kepada pengusaha, (b) memberikan kepastian dan

kejelasan kebijakan, (c) mendorong sektor jasa dan perdagangan, (d) meningkatkan daya saing pengusaha daerah, dan (e) membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah harus memiliki kompetensi dan menerapkannya di daerah jika daerahnya ingin maju.

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah boleh dikatakan bahwa sebagian besar kewenangan pemerintah pusat sudah beralih pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kekayaan daerah sepenuhnya kewenangan daerah untuk mengelolanya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Pembangunan ekonomi di daerah telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah di daerah.

Menurut Arsyad (2004a:298), <sup>10</sup> pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Abipraja (2002:94) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi <sup>12</sup> diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

<sup>23</sup> Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang

ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Untuk mencapai itu pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama dapat mengambil inisiatif pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Potensi sumberdaya yang ada di daerah dapat dioptimalkan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah menurut Arsyad (2004a:298) terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal kedaerahan. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah yang bersangkutan dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi daerah.

Pembangunan daerah secara ringkas dinyatakan Arsyad (2004b:115) bahwa, Pembangunan Daerah = f (sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan).

Memang tidak mudah untuk melaksanakannya, walaupun daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola pembangunan di daerahnya. Teori pembangunan memang sudah banyak, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya. Tidak semua teori cocok untuk semua daerah. Teori pembangunan yang ada sekarang ini belum mampu menjelaskan kegiatan-

kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan konprehensif.

Oleh karena itu perlu suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan yang dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini seperti yang dikemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah.**

<b>Komponen</b>	<b>Konsep Lama</b>	<b>Konsep Baru</b>
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan sama dengan makin banyaknya peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Arsyad (2004b:119).

Pembangunan ekonomi daerah harus dirancang sesuai potensi sumberdaya yang ada dan miliki daerah, yang kemudian dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita daerah dan puncaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah secara keseluruhan.

## Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinyatakan dalam Arsyad (1999:133) bahwa ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

<sup>6</sup> Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional (horizontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas, biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.

Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogiannya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, terlebih dahulu adalah menentukan peran pemerintah daerah yang akan dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Menurut Blakely dalam Arsyad (2004a:311) ada empat <sup>7</sup> peran yang dapat

diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan di daerah.

Dalam peran entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

Dalam peran koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan sebagai strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peran ini dalam pembangunan ekonomi daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya.

Pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

Dalam peran fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

Peran stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan memengaruhi perusahaan-

perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri kecil melakukan pameran-pameran produknya.

Keempat peran tersebut sangat penting artinya bagi pembangunan daerah. Jika peran ini dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik maka pembangunan daerah akan menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Jayus dalam Halim (2007:112) mengatakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi harus menjadi program yang harus dikelola secara serius. Berdasarkan sumber di Bappenas dan Badan koordinasi Penanaman Modal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,8 persen di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi sebesar 479,9 triliun rupiah, pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2005 dibutuhkan investasi 379,8 triliun rupiah, dan pada tahun 2006 untuk pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dibutuhkan investasi 471,4 triliun.

Untuk menggairahkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah telah memiliki Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undangundang Otonomi Daerah tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Dalam suasana eforia, maka pemda ramai-ramai membuat peraturan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Perda pajak dan Retribusi daerah banyak yang memberatkan dunia usaha dan para investor di daerah.

Terdapat kurang lebih 500 Perda tentang Pajak dan Retribusi yang sedang ditelaah oleh Departemen Keuangan. Jumlah tersebut terdapat lebih dari 40 Perda yang telah dibatalkan karena menetapkan pajak dan retribusi daerah yang tidak perlu dan melanggar

peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Oleh karena itu pada akhir Maret 2007 Pemerintah pusat bersama DPR telah menetapkan regulasi baru tentang Undang-undang Penanaman Modal. Produk hukum inilah yang menjadi aturan main dalam berinvestasi. Di situ dijelaskan bahwa investasi daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari pelayanan sampai perizinan.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Lipsey *et al.* (1995:39) menyatakan produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah ukuran total semua nilai tambah di dalam sistem ekonomi. Besarannya merupakan ukuran semua keluaran akhir yang diproduksi oleh semua aktivitas produktif di dalam sistem ekonomi itu.

PDRB menurut Suparmoko dkk (2006:31) adalah catatan tentang jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk waktu satu tahun lamanya. Nilai PDRB suatu daerah tersebut sebenarnya sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi/lapangan usaha dalam wilayah daerah yang sama. Menurut BPS (2004:21) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan tiga metode (Widodo,1990:36), yaitu cara tahunan dan rata-rata setiap tahun atau dengan compounding factor.

(1) Cara Tahunan

$$\Delta PDB_x = \frac{PDB_x - PDB_{x-1}}{PDB_{x-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta PDB_x$  = Laju pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*) X = Tahun tertentu

X-1 = Tahun sebelumnya

PDB = Produk Domestik Bruto

(2) Cara rata-rata setiap tahun

$$r = \left[ \left( \frac{t_n}{t_0} \right)^{\frac{1}{n-1}} \right] \times 100 \%$$

atau dengan *compounding factor* :

$$t_n = t_0 (1 + r)^{n-1}$$

Keterangan:

r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n = Jumlah tahun (dihitung mulai dengan sampai dengan)

t<sub>n</sub> = Tahun terakhir periode

t<sub>0</sub> = Tahun awal periode

(1+r)<sup>n-1</sup> = Mencerminkan *Compounding factor*

Secara nasional dalam analisis makro ekonomi penghitungan Produk Nasional Bruto (PNB) pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu a) pendekatan produksi (*production approach*) yang menghasilkan gross national product (GNP), b) pendekatan pendapatan (*income approach*) yang menghasilkan gross national income (GNI), c) pendekatan pengeluaran/pembelanjaan (*expenditure approach/GNE*). Menghitung besarnya

pendapatan nasional/ daerah dengan menggunakan metode dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama besarnya.

Begitupun dalam kegiatan ekonomi di daerah, perhitungan PDRB mengacu pada ketiga pendekatan tersebut di atas: produksi, pendapatan, dan pembelanjaan (BPS,2004:21). Penghitungan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah (value added) atas <sup>5</sup> barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penghitungan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, menghitung balas jasa faktor produksi (Arsyad,2004a:14). Penghitungan pendekatan pengeluaran adalah semua <sup>5</sup> komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestik bruto, penambahan stok dan ekspor netto dalam wilayah tertentu.

Dalam penghitungan PDRB, pendekatan pendapatan dan pengeluaran tidak banyak digunakan. Penghitungan pendekatan produksilah yang banyak digunakan oleh daerah provinsi, kabupaten atau kota. Menurut metode produksi, pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan setiap sektor produktif dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Lapangan usaha melalui pendekatan produksi yang dihitung dibagi dalam 11 (sebelas) sektor. Kesebelas sektor tersebut menurut Mangkoesobroto (1998:10) sebagai berikut ;

- <sup>3</sup> 1) Sektor pertanian
- 2) Sektor pertambangan
- 3) Sektor industry

- 4) Sektor bangunan
- 5) Sektor perdagangan
- 6) Sektor listrik, gas dan air minum
- 7) Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya
- 8) Sektor perhubungan dan telekomunikasi
- 9) Sektor pemerintahan dan hankam
- 10) Sektor sewa rumah
- 11) Sektor jasa-jasa lainnya.

Kesebelas sektor tersebut di atas, oleh BPS sudah diubah menjadi 9 (sembilan) sektor saja dengan tidak menghilangkan jenis sektor-sektor di atas, kecuali dengan menggabungkannya dengan sektor lainnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDRB Kabupaten/Kota tersebut harus dibandingkan laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Perubahan nilai pertumbuhan akan terjadi dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga (Arsyad, 2004a:15).

Suatu <sup>13</sup> perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jumlah barang (goods) dan jasa (services) secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pendapatan regional dapat dibedakan menurut harga yang berlaku (market price) dan menurut harga konstan (*constant price*). Harga yang berlaku adalah <sup>10</sup> semua agregat pendapatan dinilai atas harga yang berlaku pada saat tahun perhitungan. Harga konstan, yaitu <sup>10</sup> semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar.

Berdasarkan analisis di atas berarti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah. <sup>33</sup> Barang dan jasa yang diproduksi di daerah meningkat. Jasa-jasa faktor produksi masyarakat daerah sudah terbayarkan. Pendapatan per kapita masyarakat di daerah juga meningkat. Jika PDRB suatu daerah semakin besar, maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah tersebut. Sehingga potensi daerah kabupaten/kota dapat dioptimalkan melalui pengembangan sektor-sektor pembangunan dengan adanya peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi di daerah.

BPS (2007b:2) Data PDRB mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Data PDRB Kabupaten/Kota sangat diperlukan. BPS dengan Bappeda telah melakukan perhitungan PDRB Kabupaten/Kota secara berkala. Secara konsep dan definisi PDRB adalah jumlah <sup>17</sup> seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/ lapangan usaha dari suatu kegiatan usaha di suatu wilayah/region (kabupaten/kota), tanpa memerhatikan pemilikan faktor-faktor produksi. <sup>17</sup> Secara agregatif PDRB menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Lapangan usaha yang dihitung dalam Produk Domestik Regional Bruto itu dibagi menjadi sembilan sektor berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). <sup>17</sup> Sektor primer, meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder meliputi industri, listrik, gas dan air bersih, dan konstruksi. Sektor tersier berupa jasa, meliputi perdagangan, restoran, hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa lainnya. <sup>6</sup> Hasil perhitungan PDRB Kabupaten/Kota disajikan atas dasar harga berlaku (*market price*) dan atas dasar harga konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-

unit produksi di dalam suatu daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Hanya menggambarkan volume/kuantum produksi saja.

## Klasifikasi Indikator<sup>2</sup> Ekonomi Daerah

Menurut Kuncoro (2006:19) untuk tujuan operasional dan analisis, kriteria utama Bank Dunia dalam mengklasifikasi kinerja perekonomian suatu negara adalah GNI (*Gross National Income* atau Produk Nasional Bruto) per kapita.

GNI per kapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk. World Development Report Bank Dunia tahun 2003 mengklasifikasi negara berdasarkan tingkatan GNI per kapitanya, sebagai berikut.

- 1) Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies-LIE*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US\$ 745.
- 2) Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies-MIE*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita lebih dari US\$ 745 namun kurang dari US\$ 8626.
- 3) Negara berpenghasilan tinggi (*high-income economies-HIE*) adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita US\$9.206 atau lebih.

Untuk mengetahui kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, klasifikasi kinerja perekonomian negara dari *World Development Report* Bank Dunia tersebut di atas dimodifikasi menjadi klasifikasi kinerja perekonomian daerah yang perhitungannya tetap menggunakan GNI (*Gross National Income*) per kapita; produk regional bruto (PRB) dibagi jumlah populasi penduduk daerah dengan tidak merubah jumlah nominal indikatornya.

Angka nominal per kapita akan dibandingkan nilai tukar rupiah (IDR) Indonesia

dengan mata uang asing dolar Amerika (per 1 US\$). Klasifikasi perekonomian daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan tingkatan GNI per kapitanya dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori kelompok ekonomi berikut.

- 1) Kabupaten/Kota di Jawa Timur <sup>2</sup>berpenghasilan rendah (*low-income economies*-LIE) adalah kelompok kabupaten/kota dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US\$ 745.
- 2) Kabupaten/Kota di Jawa Timur <sup>2</sup>berpenghasilan menengah (*middle-income economies*-MIE) adalah kelompok kabupaten/kota dengan GNI per kapita lebih dari US\$ 745 namun kurang dari US\$ 8626.
- 3) Kabupaten/Kota di Jawa Timur <sup>2</sup>berpenghasilan tinggi (*high-income economies*-HIE) adalah kelompok kabupaten/kota dengan GNI per kapita US\$9.206 atau lebih.

## Indeks

Pertumbuhan ekonomi  
Stabilisasi ekonomi  
Pembangunan ekonomi  
Pergeseran ekonomi  
PDB (product domestic bruto)  
GNI(gross national income)  
GNP(gross national product)  
GNE(gross national expenditure)  
Teori Dependensia  
Investasi pemerintah  
investasi swasta (corporate)  
investasi individual  
investor  
investasi perspektif ekonomi  
investasi perspektif manajemen keuangan  
belanja modal  
belanja investasi  
private investment  
public invesment  
autonomus invesment  
induced invesment  
domestic invesment  
gross invesment  
net invesment  
foriegn invesment  
real asses  
financial assets  
inflasi  
private sector  
public sector  
NPV (Net Present Value)  
IRR (Internal Rate of Return)  
Capital rationing  
The rate of interest  
MEC (Marginal efficiency of capital)  
Revenue  
Cost  
Expectation  
Deviden  
Royalty  
Cost and benefit analysis  
Humman invesment  
PAD (Pendapatan Asli Daerah)  
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)  
KADIN (Kamar Dagang dan Industri)  
KPOD(Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah)  
Portfolio  
Expected return  
OSS (one stop services)  
Current expenditure  
Capital expenditure  
Transfer of payment  
Exhaustic expenditure  
Supply labour  
Sallary/wages  
Manpower  
Labors marginal revenue product  
Employment  
Unemployment  
Penganggur sukarela  
Penganggur friksional  
Penganggur struktural  
Sektor primer  
Sektor sekunder  
Sektor tersier  
Ekonomi kesejahteraan  
Disparitas pendapatan  
Neoklasical  
Utility  
Satisfaction  
PQLI (Physical qulaity of life index)  
IPM (indeks Pembangunan manusia)  
HDI (Human development index)  
UNDP  
Pembangunan ekonomi daerah

## Tentang Penulis



**Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si**, lahir di Kuningan Jawa Barat, lulus S3 Economic Sains (2011) dan S2 Management Sains (1999) dari Universitas Airlangga. S1 dari Universitas Siliwangi (1986) dan UWP (1995). Sejak S1, S2, dan S3 adalah penerima beasiswa pemerintah BPPS, TMPD. Ia pernah menjabat Wakil Rektor III, Waka LPPM, Wakil Dekan I FEB, Ketua Jurusan Manajemen, Sekretaris FE, Sekretaris Rektor, Ketua Tim Penilai Jabatan akademik Dosen, Asesor Dosen BKD, Tim Penjamin Mutu, Anggota Senat FE, dan Senat Universitas. Penulis masih sebagai *Chief Editor Balance Journal*, redaktur media informasi ilmiah, reviewer jurnal terakreditasi, reviewer dosen internal. Sejak 1990 hingga sekarang dosen tetap FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan jabatan Lektor kepala dan asesor guru bidang ekonomi. Di samping mengajar di beberapa perguruan tinggi juga aktif meneliti, penulis bahkan sering memperoleh penelitian hibah bersaing, hibah pascasarjana, Fundamental, Unggulan perguruan tinggi dari Dirjen Dikti Kemendiknas, hibah PT. Kereta Api Indonesia, hibah Dolog/Bulog, hibah pemda/kota, Pemprov Jatim, dan menulis buku ber ISBN, karya ilmiah, *workingpaper* yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Internasional. Penulis juga aktivis semenjak pelajar, mahasiswa hingga sekarang diberbagai organisasi. Pernah menjadi ketua OSIS, ketua ikatan Pemuda dan Pelajar, ketua HMJ, ketua BEM-Fakultas, Ketua BEM-Universitas, Ketua HMI kapid kader, Sekretaris KNPI, Sekretaris Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM, pimpinan PCM, ketua Litbang Orpol, anggota ICMI, ISEI, MEI, Calon Legislatif Prov. Jatim Koordinator pemantau Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif era awal demokrasi langsung.

-----Ini Teks utk Cover belakang.-----

Pertumbuhan ekonomi(*economic growth*) memiliki korelasi positif terhadap konsumsi, saving, investasi, belanja pemerintah dan ekspor netto. pertumbuhan ekonomi Salahsatu tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara/daerah. Ada tiga pendekatan formula pertumbuhan ekonomi; GDP(produk), GNI(pendapatan), GNE(pengeluaran). Investasi(*investment*) memiliki dampak ganda(*multiplier effect*) dari belanja modal/belanja investasi terhadap peningkatan pendapatan penduduk, sekaligus penerimaan pajak(*tax*). Ada investor individual, investor corporate, investor pemerintah. Tujuan investasi individu; meningkatkan kekayaan pribadi. Tujuan investasi swasta; ekspansi, perluas pabrik, peningkatan kapasitas produksi/volume produksi, perluas jaringan pasar. Investor pemerintah; perluas kapasitas pelayanan publik, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, terminal, stasiun. Semua aktivitas investor berdampak positif searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang berbeda makna pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi(*economic development*). Memang pertumbuhan ekonomi hanya penambahan barang(*goods*) dan jasa(*sevices*) saja. Sedangkan Pembangunan ekonomi; meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan dan penghasilan penduduk, di samping bertambahnya barang-jasa.

## Daftar Pustaka

- <sup>2</sup> Abipraja, Soedjono, (2002), *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijakan, Instrument serta Strategi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Afiatno, Bambang E., (2005), *Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Timur dari Pengaruh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Eksternal*, FE, Unair: Surabaya: Unpublish.
- Ahmad, Komarudin, (1996), *Dasar-dasar Manajemen Investasi*: Jakarta: RinekaCipta.
- APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Gatra-Paragon Communications, *Tantangan Otonomi Daerah: Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah*, Ballroom Hotel Sahid Jaya : Jakarta, 5-6 September 2001, Makalah Seminar
- Asshiddiqi, (2000), *Otonomi daerah dan Peluang Investasi*: Jakarta: Makalah Seminar Government Conference.
- <sup>33</sup> Arsyad, Lincolin (1999), *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua : Yogyakarta : Penerbit BPFE-UGM.
- Arsyad, Lincoln, (2004a), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keempat : Yogyakarta : STIE YKPN.
- , 2004b. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*: Yogyakarta: BPFE-Universitas Gajah Mada.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Statistik Indonesia* : Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Pemprov. (2007), *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur*: Surabaya.
- <sup>27</sup> Barro, R.J. (1990), *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*, *Journal of Political Economy* 98: S103-S125
- Bank Indonesia kerjasama dengan P3M FEUNIKA Soegijapranata Semarang (2000) : *Analisis Dampak Penerapan One Stop Service (OSS) Terhadap Peningkatan Investasi di Jawa Tengah*, BI : Semarang, Hasil Penelitian
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK./2004 Tanggal 20 Juli 2004 Tentang *Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, BKPM : Jakarta.
- Badan Penanaman Modal (BPM) *Provinsi Jawa Timur, 2009*, Surabaya.
- Budiono, (1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan ke Enam: Yogyakarta : BPFE-UGM.
- BPS, Bappenas-UNDP, (2001), *Indonesia Human Development Report*: Jakarta
- BPPK Departemen Keuangan, (2004), *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. *Jurnal Keuangan Depkeu*: Jakarta. [Http://www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).
- Dawood, Taufiq, Aliasuddin, (2008), *Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Aceh*, Hasil Penelitian Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas Bengkulu, Universitas Syiah Kuala, 27-28 Oktober 2008.
- Darwanto, Herry, (2007), *Prinsip-Prinsip Pembangunan Ekonomi Daerah*: Jakarta: Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
- Daniri. 2005. *Menyibak iklim Investasi Daerah*: Jakarta.

- Daud, Nahu. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ekonomi Daerah dan Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku*, Disertasi, Tidak dipublikasikan: Surabaya.: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Darussalam, Wan. 2005. *Pengaruh Peruntukkan Lahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Sektoral serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pulau Batam*, Disertasi; Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Deliarinov, (2005), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* : Jakarta : Raja Grafindo.
- Dornbusch, Rudiger, and Stanley Fisher, (1986), *Macroeconomics*, Terjemahan, Edisi ketiga : Jakarta : Eralngga.
- Dumairy, (1996), *Perekonomian Indonesia*: Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Fuadi, Mamik Mochamad, (2003) *Analisis Pola Preferensi Investor Terhadap daya tarik Investasi Di Daerah Dalam Era Otonomi Daerah dan Pasar Bebas; Tesis S2, Industrial Management Engineering*, tidak dipublikasikan: Bandung : ITB.
- Frans Dionase (2008), *Mengembangkan Daya Tarik investasi Daerah; Studi Kasus Propinsi Bengkulu*: Jakarta : Sabtu, 13 Desember 2008.
- Halim, Abdul, (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan kedua : Yogyakarta :UPP-YKPN.
- Halim, Abdul, Theresia Damayanti, (2007), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan pertama: Yogyakarta: UPP STIM-YKPN.
- Indonesia-Netherlands Association; Indonesia, Belanda, Belgia dan Luxemburg-(INA)(2008), *Kajian Perda dan Iklim Investasi Daerah di Indonesia* : Jakarta : Hasil Penelitian INA
- Inpres No.3/2006 *Kebijakan tentang Iklim Investasi Bagi Para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia*: Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Jhingan, M.L., (2007), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi keenam Belas : Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kamar Dagang dan Industri (KADIN), (2003), *Kajian Iklim Investasi di Indonesia*: Jakarta.
- Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Biro Keuangan, (2002-2006), *Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Timur*.
- Kartasasmita, Ginanjar, (2008), *Investasi Di Indonesia Pasca Otonomi Daerah; Peluang dan Tantangan*: Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 *Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*.
- Kim, Sung Tai, (1997), *The Role of Local Public Sectors in Regional Economic Growth in Korea*, Asia Economic Journal, 11 : 155-168
- Kuncoro, Mudrajat, (2006), *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, edisi keempat : Yogyakarta : UPP YKPN.
- Kuncoro, Haryo, (2007), *Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja dan PDRB pada Kota dan Kabupaten di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan ; *Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol.12 No.3 Desember 2007, Hal : 195-211.
- KPPOD (2001) *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota; Studi Kasus 90 Kab/ Kota ; di 68 Kabupaten, 22 Kota dari 24 Propinsi di Indonesia*: Jakarta: Hasil Penelitian
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation, (2004) *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di*

- Indonesia, Persepsi Dunia Usaha*, KPPOD: Jakarta: Hasil Penelitian.
- KPPOD, USAID dan The Asia Foundation, (2007) *Survey tentang Daya Tarik Investasi Daerah pada Pelaku Usaha dari 243 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi di Indonesia*: Jakarta : Hasil Penelitian.
- Lembaga Kajian Ekonomi Regional/LKER, (2007), *Survey Faktor-Faktor Non Ekonomi Yang Mempengaruhi Iklim Investasi Di Sulawesi Selatan*: Sulawesi Selatan: Hasil Penelitian.
- Lipsey, G.Richard, Paul N. Courant, Douglas D Purvis, Peter O Steiner, (1995), *Economics*, Terjemahan, Edisi Kesepuluh : Jakarta : Binarupa Aksara.
- Mardiasmo, (2000), *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Implementasi value for money audit sebagai Antisipasi Terhadap Tututan Akuntabilitas Publik*, JAAI, Vol.4 No. 1 Juni pp. 35-49.
- Mahyudi,A., (2004), *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris* : Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mawardi,(2000), *Analisis Dampak Kebijakan Investasi Pemda dan Industri terhadap Struktur Penyerapan Tenaga kerja di Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta Universitas indonesia (UI)*: Jakarta: Tesis tidak dipublikasikan.
- Mawardi, (2000), *Analisis Dampak Kebijakan Investasi Pemda dan Industri terhadap Struktur Penyerapan Tenaga kerja di Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta*. Tesis, tidak dipublikasikan: Jakarta: Universitas Indonesia (UI).
- Masjkuri, Siti Umayah, Ahmad Sjafii, (2008) *Pembangunan Manusia dan Kontribusinya terhadap Ukuran Kesejahteraan Di Indonesia; Pendekatana Non-Moneter Dalam menakar Keberhasilan Pembangunan*: Surabaya: Departemen Ilmu Ekonomi, FE, Universitas Airlangga, Research Grant.
- Mangkoesebroto, Guritno, (1998), *Teori Ekonomi Makro*: Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Manurung, Adler Haymans, (2008), *Pengelolaan Obligasi Daerah*: Jakarta :Artikel.
- Meier, GM, (1995), *Leading Issues in Economic Development*, 3rd : New York, Oxford University Press.
- Musgrave, Richard. A. and Peggy B Musgrave, (1991), *Public Finance in Theory and Practice*, Four Edition : New York, McGraw Hill,Inc.
- Muhidin,Ali,Sambas,(2007),*Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian*: Bandung: Pustaka Setia.
- Mubyarto, Budhy Tjahyati, (1997), *penyunting, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*: Jakarta : Gramedia.
- Pass, Christopher and Bryan Lowes, (1977), *Dictionary of Economics*, Terjemahan, Edisi kedua : Jakarta : Gelora Aksara Pratama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*: Jakarta: Penerbit Yamita Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*: Bandung : Fokusmedia.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 tahun 2007 Tentang *Belanja Pemerintah*: Jakarta: Depdagri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2007*: Bandung : Penerbit Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah R.I. No.58 Tahun 2005 dan No.8 Tahun 2007 tentang *Pedoman*,

*Perencanaan dan Pelaksanaan Investasi Pemerintah.*

- Priyo Hari Adi, David Harianto, (2004), *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pendapatan Per Kapita*: Salatiga: FE-Universitas Kristen Satya Wacana.
- Pressman, Steven, (2000), *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*: Jakarta: PT Radja Grafindo.
- Purwoko, Singgih Riphath, Bambang Prihartono (2004), *Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor; Kasus Kabupaten Tenggamus*: Provinsi Lampung, Hasil Penelitian.
- Reksohadiprojo, Sukanto, (2001), *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama: Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Rosyidi, H, (2004), *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi baru: Jakarta : Rajawali Pers.
- Samuelson, Nordhaus, (2003) *Microeconomics*, Terjemahan, Edisi ketujuh belas : Jakarta : PT Media Global Edukasi.
- Santoso, Ismanto Hadi, (2000), *Keterkaitan Antar Sektor dan factor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Jawa Timur*, Disertasi: Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sarwono, Jonathan, (2007), *Analisis Jahur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS, Aplikasi dalam Riset Keuang<sup>19</sup> Pemasaran, MSDM dan Kewirausahaan*: Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sasana, H., (2008), *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Daerah serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah*; Surabaya: Ringkasan Disertasi, Tidak Dipublikasikan, PPS Universitas Airlangga.
- Sekaran, Uma, (2003), *Research Methods for Business: A Skill Building approach (4thed)*: New York : John Willey<sup>14</sup> d Sons.
- Simanjuntak, A, J. Payaman, (1985), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*: Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Siregar, Iskandar, (2004), *Analisis Perkembangan Penerimaan Pendapatan asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*: Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI.
- Sinring, Bahar, (2003), *Kemandirian Pemda Dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi Era Otonomi Daerah di Kota Makasar dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*, Disertasi: Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Soeroto, (1986), *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*: Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press. <sup>33</sup>
- Solihin, Ahmad, (2002), *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Suparmoko, Maria Ratnaningsih, Arisitn, T. Apriliani dan Dwi Sudharto, (2006), *Produk Domestik Regional Bruto Hijau*: Yogyakarta: BPFE-UGM.
- , (2001), *Ekonomi publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi pertama: Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suparmoko, (2002), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5: Yogyakarta: BPFE.
- Sukirno, Sadono, (2000), *Makroekonomi Modern ; Perkembangan Pemikiran dari Klasik H<sup>19</sup>ga Keynesian Baru* : Jakarta : Rajawali Pers.
- , (2006), *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan*, Edisi kedua: Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- , (2007), *Ekonomi Makro: Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Klasik Hingga Keynesian*: Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J., (2004), *Ekonometri*, Buku Kedua ; Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Solimun, (2002), *Multivariate Analysis, Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos, Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokompleks* : Malang : Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.
- Stiglitz, Joseph E., (2003), *Globalization and Its Discontents*, Terjemahan; Jakarta: Ina Publikatama.
- Tambunan, Tulus, (2001), *Perekonomian Indonesia; Beberapa Masalah Penting* : Jakarta : Ghalia.
- Todaro, Michael P., and Smith Stepen, C. (2004), *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga, 1 dan 2* ; Jakarta : Erlangga.
- Tjitroesmi, Endang, Wiranta Sukarna, Sarana, Jiwa, Ermawati, Tuti, Agung Dhani, (2006), *Investasi di era Otonomi Daerah*: Jakarta: Pusat Penelitian P2E-LIPI.
- United Nations-Bappenas (2004), *Indonesia; Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium*: Jakarta: BappenasUnited Nations.
- Website Badan Penanaman Modal Prov. Jatim; <http://bpmjatim.com.id>
- Widodo, HG.Suseno Triyantono, (1990), *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*: Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- World Bank, (2003), *Kota-kota Dalam Transisi, Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*, Working Paper No.7
- Yuliati, Sri Handaru, Handoyo Prasetyo, Fandy Tjiptono, (1996), *Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi* : Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Yuliot, Direktur Promosi Dalam Negeri, *Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta*, (BKPM).

# Hasil Plagiasi Buku Membedah Investasi

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to iGroup

Student Paper

3%

2

Submitted to Udayana University

Student Paper

3%

3

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas  
Indonesia

Student Paper

2%

4

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

2%

5

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

6

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
17	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%

20	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1%
21	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
22	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
23	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1%
24	Ambok Pangiuk. "PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI (STUDI TAHUN 2012-2015)", <i>ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research</i> , 2017 Publication	<1%
25	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
26	Submitted to Universitas Gunadarma Student Paper	<1%
27	Nurul Imamah. <i>JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)</i> , 2018 Publication	<1%
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1%

29

Submitted to University of Malaya

Student Paper

<1%

30

Ahmad Zainuri. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018

Publication

<1%

31

Submitted to Trisakti University

Student Paper

<1%

32

Riri Oktari Ulma. "EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADA USAHA TANI JAGUNG", Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi|JITUJ|, 2017

Publication

<1%

33

Anik Ambarwati, Payamta Payamta. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI JAWA", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2015

Publication

<1%

34

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

<1%

35

Submitted to Universitas Muhammadiyah

Surakarta

Student Paper

<1%

36

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Student Paper

<1%

37

Submitted to International School of Management and Technology

Student Paper

<1%

38

Submitted to University of Colorado, Denver

Student Paper

<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 20 words

Exclude bibliography  On